

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH  
DASAR DI KOTA BATU**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Reformasi  
Pemerintahan**

**Oleh:  
Firman Kholit  
NIM :135120600111022**



**PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2018**

**Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Batu**

## SKRIPSI

**Disusun Oleh:**  
**Firman Kholit**  
**NIM.135120600111022**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP  
NIP. 198108252015041001  
Tanggal: 19 Juni 2018

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si  
NIK. 198308172015042002  
Tanggal: 19 Juni 2018

# Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Batu

## SKRIPSI

**Disusun Oleh:**  
**Firman Kholit**  
**NIM.135120600111022**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik  
pada tanggal 22 Juni 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si  
NIK. 2013048811042001

Laode Machdani Afala S.IP., M.A.  
NIK. 2016078703181001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP  
NIP. 198108252015041001

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si  
NIK. 198308172015042002

**Malang, 19 Juni 2018**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.,SI., Ak.  
NIP. 196908141994021001

## PERNYATAAN

Nama: Firman Kholit  
NIM: 135120600111022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Batu** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti persyaratan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 19 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Firman Kholit  
135120600111022

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Batu”***.

Penelitian skripsi ini mendasarkan pada isu kurang optimalnya program mobil operasional dalam meningkatkan pembangunan desa. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang turut membantu baik berupa saran, bimbingan serta dorongan semangat selama proses penulisan, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan selalu mencurahkan cinta kasih-Nya serta memberikan ridho-Nya sehingga penulis masih dapat merasakan kenikmatan hidup hingga saat ini.
2. Junjungan besar Nabi Muhammad ﷺ yang telah memberikan teladan kepada penulis sehingga engkau menjadi panutan hidup untuk mengarungi kehidupan ini.

3. Kedua orang tua yang teramat penulis cintai dan hormati, Mama tercinta Sahariah, terimakasih untuk doa yang selalu engkau selipkan dalam setiap sujudmu, terimakasih untuk selalu mengingatkan dan memberikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Baoak terkasih, terimakasih untuk setiap doa dan seluruh peluh dan tetesan keringat yang engkau keluarkan dalam perjuanganmu memberikan kebahagiaan dalam keluarga ini. *Alhamdulillah*.
4. Istri tersayang, Rara Husnul Khatimah Hadi. Terimakasih atas segala motivasimu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Keluarga besar yang juga turut memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Joko Purnomo S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Rachmad Gustomy, S.IP., M,IP selaku dosen pembimbing atas segala bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
8. Ahmad Zaki S,IP., M.A selaku dosen pembimbing atas segala bimbingannya serta arahan-arahan yang diberikan kepada penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.



9. Ibu Restu Karlina Rahayu , S.IP., M.Si selaku dosen penguji atas segala ide, saran dan kritiknya yang membangun membuat penulis belajar untuk memperbaiki tulisan menjadi lebih baik.
10. Terimakasih kepada Ibu Alik Suharyani selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu terima kasih atas ketersediannya untuk wawancara dan memberikan data mengenai implementasi pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar di Kota Batu.
11. Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Kelompok Kerja Inklusif Kota Batu, dan Guru SDN Mojorejo 01 terima kasih atas ketersediannya untuk wawancara dan memberikan data mengenai implementasi pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar di Kota Batu.
12. Bapak Suwandi selaku Kepala Sekolah SDN Tlekung 01, dan Guru SDN Tlekung 01 terima kasih atas ketersediannya untuk wawancara dan memberikan data mengenai implementasi pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar di Kota Batu.
13. Ibu Sri Winarti selaku Kepala Sekolah SDN Junrejo 01 dan Guru SDN Junrejo 01 terima kasih atas ketersediannya untuk wawancara dan memberikan data mengenai implementasi pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar di Kota Batu.
14. Seluruh dosen serta karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya.

15. Terakhir kepada teman-teman terbaik di Ilmu Pemerintahan FISIB UB, terimakasih atas semua dukungan dan pengalaman yang kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf kepada semua pihak apabila terjadi kesalahan. Harapan penulis semoga laporan hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.



Malang, 19 Juni 2018

Penulis



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang khususnya kepada kedua orang tua Ibu Sahariah dan Bapak Ansyaruddin serta kepada Rara Husnul Khatimah Hadi. Mereka adalah sumber doa-doa saya dan keluarga yang selalu memberi dukungan lahir dan batin., semoga saya dapat menjadi manusia yang dibanggakan dan bermanfaat bagi kehidupan mereka dan orang lain. AAMIIN

-Firman Kholit, 2018-



## ABSTRAK

**Firman Kholit, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang 2018. Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Batu. Tim Pembimbing: Rachmad Gustomy S,IP., M.IP dan Restu Karlina Rahayu S,IP., M.Si**

Pendidikan inklusif merupakan sebuah program kebijakan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah di sekolah reguler. Pendidikan inklusif merupakan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2014 Kota Batu pun mendeklarasikan pendidikan inklusif. Hal ini dilakukan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Tidak Dapat Didik yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan / Atau Bakat Istimewa Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Walikota Batu Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kota Batu dapat digunakan dalam pendidikan dasar inklusif pada sekolah dasar. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu. Implementasi pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu telah berjalan akan tetapi masih banyak pada saat penyelenggaraannya. Kendala yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah kurang memadainya fasilitas yang dimiliki pihak sekolah dan juga masih kurangnya tenaga pendidik untuk anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori implementasi oleh George Edward III dan komponen-gian pendidikan inklusif yang menjadi tolak ukur. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu masih banyak harus diperbaiki dari aspek sumber daya, sumber daya manusia, dan sarana prasarana

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar.*

## ABSTRACT

**Firman Kholit. Governmental Studies, Faculty of Social Science And Political Science, University of Brawijaya Malang 2017***Implementation of Inclusive Education at Primary School Level in Batu City. Preceptor Team: Rachmad Gustomy S,IP., M.IP and Restu Karlina Rahayu S,IP., M.Si*

*Inclusive education is a policy program that provides opportunities for children with special needs to attend regular school. Inclusive education is an improvement of the quality of education in Indonesia. In 2014 Kota Batu also declared inclusive education. This is done in the Regulation of the Minister of National Education Number 70 Year 2009 About Uneducable Education Who Has Abnormalities And Potential Of Intelligence And / Or Special Talent With East Java Governor Regulation No. 6 of 2011 on the Implementation of Inclusive Education of East Java Province and Mayor Regulation Batu Number 24 Year 2013 on the Implementation of Inclusive Education. Kota Batu can be used in basic education inclusive in primary schools. On that basis, this study aims to find out how the implementation of inclusive education at elementary school level in Batu City. Implementation of inclusive education at elementary school level in Batu City has been running but still many at the time of its implementation. The constraints imposed by the school are inadequate facilities owned by the school and also still lack of educators for children with special needs. The research method used is descriptive with qualitative approach. Data collection in research using interview technique, and documentation. The researcher uses the theory of implementation by George Edward III and the inclusive inclusive education component of benevolence that becomes the benchmark. From the research result, it was found that inclusive education at jenjang primary school in Batu City still have to be improved from aspect of resources, human resources, and infrastructure.*

**Keywords:** *Implementation, Inclusive Education, Elementary School.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Manfaat Akademis .....	12
1.4.2 Praktis .....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Kerangka Teoritik .....	22
2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	22
2.2.2 Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif.....	29
2.3 Alur Pikir Penelitian .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian.....	36
3.4 Jenis Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5.1 Observasi.....	38
3.5.2 Wawancara .....	39
3.5.3 Dokumentasi.....	41
3.6 Teknik Analisa Data .....	41
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Batu .....	44
4.1.1 Sejarah Kota Batu.....	44
4.1.2 Keadaan Geografis .....	45
4.1.3 Profil Wilayah .....	46
4.2 Gambaran Umum Pendidikan Kota Batu.....	48
4.3 Gambaran Umum Pendidikan Inklusif .....	51
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Komunikasi .....	53
5.2 Sumber Daya.....	57
5.2.1 Sumber Daya Manusia .....	57
5.2.1.1 Tenaga Pendidik.....	62
5.2.2 Sumber Daya Finansial .....	65
5.2.2 Sarana dan Prasarana .....	68
5.3 Disposisi.....	71
5.3.1 Input Peserta Didik .....	75
5.3.1 Lingkungan dan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif .....	76
5.4 Struktur Birokrasi.....	80
5.4.1 Standart Operating Procedur .....	80

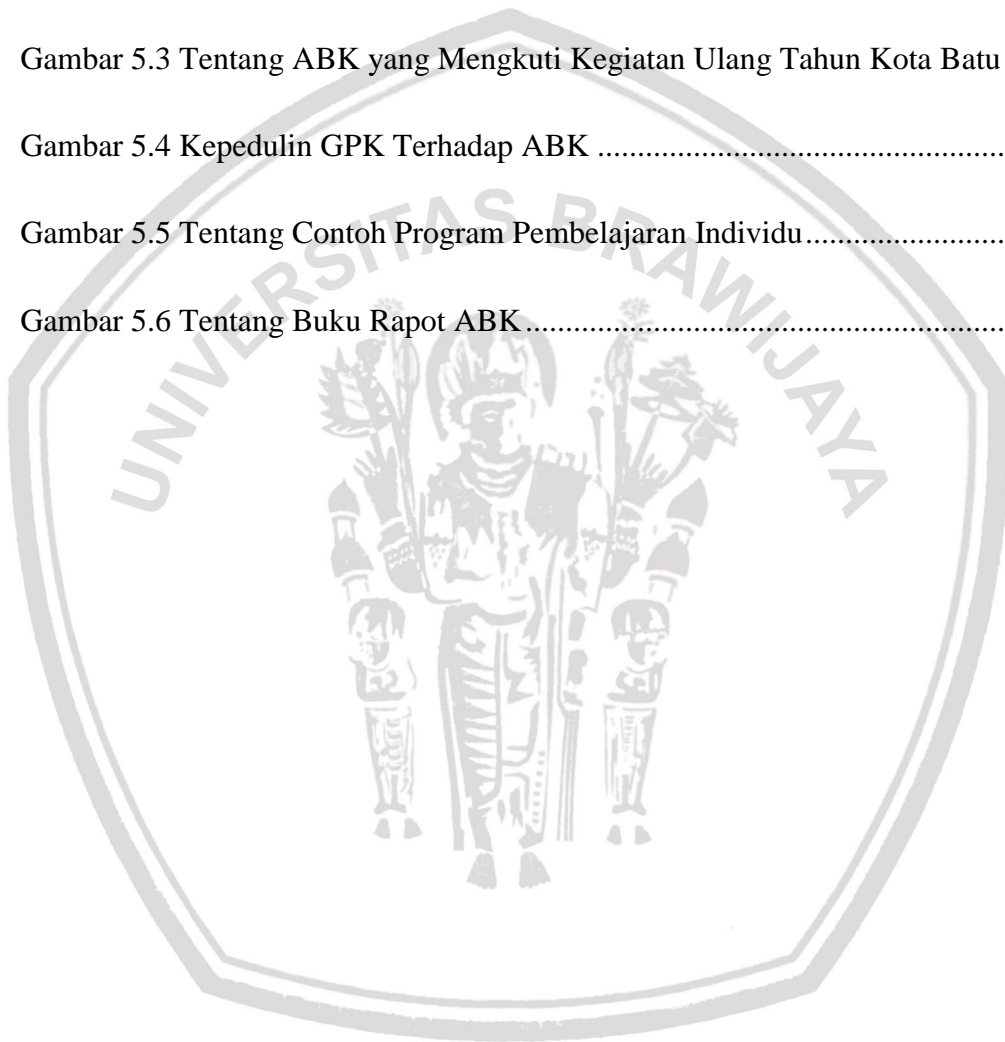
5.4.1.1 Fleksibilitas Kurikulum.....	82
5.4.1.2 Evaluasi Pembelajaran .....	86
5.4.2 Struktur Organisasi .....	89
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
6.1 Kesimpulan .....	94
6.2 Rekomendasi.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tentang Kegiatan Workshop Pendidikan Inklusif .....	59
Gambar 5.2 Fasilitas Pendidikan Inklusif Di SDN Mojorejo 01, SDN Tlekung 01, dan SDN Junrejo 01.....	69
Gambar 5.3 Tentang ABK yang Mengikuti Kegiatan Ulang Tahun Kota Batu .....	72
Gambar 5.4 Kepedulian GPK Terhadap ABK .....	74
Gambar 5.5 Tentang Contoh Program Pembelajaran Individu.....	85
Gambar 5.6 Tentang Buku Rapot ABK.....	87



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pikir .....	33
Bagan 3.1 Proses Analisis Data .....	42
Bagan 5.1 Sturuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batu.....	90



## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi Sekolah Dasar Kota Batu .....	9
Table 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara.....	40
Table 4.1 Wilayah Administratif Kota Batu .....	46
Table 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2010, 2015, dan 2016.....	47
Table 4.3 Tentang Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2014-2016 .....	49
Table 4.4 Tentang Angka Partisipasi Sekolah Kota Batu .....	50
Table 5.1 Data Guru Pembimbing Khusus Kota Batu .....	61
Table 5.2 Rekap Data Siswa ABK Se-Kota Batu .....	62

## DAFTAR ISTILAH

Anak Berkebutuhan Khusus	: Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi atau fisik
Birokrasi	: Suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida dimana orang yang berada ditingkat bawah lebih banyak dari pada ditingkat atas.
Disposisi	: Suatu keinginan, kemauan, dan kenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.
Guru Pembimbing Khusus	: Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus dan guru kelas atau mata pelajaran dala peroses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak lakukan oleh guru pad umumnya.
Implementasi	: Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matan dan terperinci.
Komunikasi	: Suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
Pendidikan Inklusif	: Sistem pelayanan pendidikan yang mengatur agar difaber dapat dilayani disekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman seusianya.
Prasarana	: Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana	: Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
Standard Operating Procedure	: Serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan ke dokumentasi mengenai proses penyelenggaraan admistrasi.
Struktur	: Tata ukur, tata hubung, tata letak dalam suatu sistem yang membentuk satuan kerja

Sosialisasi

: Proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat

Workshop

: Pertemuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman diantara sejumlah peserta yang mempunyai keahlian atau profesi yang sama guna meningkatkan pengetahuan atau memecahkan suatu masalah.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dan menjadi prioritas masyarakat pada umumnya. Pendidikan dapat menjamin terbukanya jalan bagi setiap individu manusia untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam kehidupan berbangsa, pendidikan juga memegang sebuah peranan penting, yaitu sebagai salah satu sarana pencapaian tujuan negara. Pendidikan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam kehidupan. Dengan adanya SDM yang berkualitas akan berdampak positif bagi pembangunan yang merupakan langkah penting tercapainya tujuan sebuah negara.

Pendidikan juga penting seperti yang telah diatur dalam undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>1</sup>

Pada peraturan ini telah dijelaskan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan Potensi diri yang ada di setiap individu. Namun, terkadang masih terdapat golongan atau kelompok masyarakat di Indonesia masih belum dapat merasakan pendidikan secara formal, terutama pendidikan untuk anak-anak yang memiliki

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1.



kebutuhan khusus diberikan fasilitas sekolah yang sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Dengan adanya perbedaan antara anak yang tidak ada kebutuhan khusus ini memberikan kesulitan berinteraksi ABK dengan anak pada umumnya. Hal ini mengakibatkan anak yang memiliki kebutuhan khusus menjadi kelompok yang termajinalkan.

*“Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sangatlah besar dan rendah dalam partisipasi bersekolah. Dari 1,6 juta ABK di Indonesia, baru 164 ribu anak yang mendapat layanan pendidikan, angka partisipasinya berarti 10 -11 persen saja.”*<sup>2</sup> Angka tersebut dapat dilihat besarnya angka ABK yang belum merasakan pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah berperan langsung untuk mengatasi besarnya jumlah ABK yang belum memiliki pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun SDM yang ada di Indonesia.

Selama ini, ABK diberikan fasilitas dengan 3 macam jalur pendidikan. Pertama, SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) yang dapat menampung segala macam anak berkebutuhan khusus, maka didalam SDLB terdapat berbagai jenis ABK. Kedua, SLB (Sekolah Luar Biasa) menampung ABK yang memiliki jenis kebutuhan yang sama dengan lainnya, seperti ada SLB tunagrahita, SLB tunanetra dan masih banyak yang lainnya.

Kemudian, pendidikan terpadu atau sekolah reguler yang juga dapat menampung ABK dengan menggunakan kurikulum, guru, dan sarana prasarana yang

---

<sup>2</sup> <http://www.antaranews.com/berita/527190/kemdikbud-angka-pertisipasi-bersekolah-anak-berkebutuhan-khusus-rendah> dilihat tanggal 9 September 2017, Pada Pukul 10.58 WIB.

sama seperti anak pada umumnya. Akan tetapi, masih banyak sekolah reguler yang belum dapat menerima ABK dikarenakan sekolah merasa belum dapat memfasilitasinya. Sekolah-sekolah khusus yang ada biasanya berada di Ibu Kota Kabupaten, sedangkan ABK yang berada di kecamatan atau desa tidak dapat terfasilitasi, terutama yang memiliki ekonomi yang lemah. Tidak terfasilitanya ABK untuk dapat menempuh pendidikan dapat mempengaruhi SDM yang ada di Indonesia/

Adanya peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan sebuah langkah pemerintah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009 pada pasal satu yang menjelaskan seperti dibawah ini.

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan terpadu.”<sup>3</sup>

Pada pasal diatas ABK dapat mendapatkan kesempatan dalam menempuh jenjang pendidikan terpadu bersama peserta didik lainnya. Adapun, *“implementasi sistem pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan kendala bagi semua anak dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu melalui peningkatan akses dan dukungan sistem yang memadai.”*<sup>4</sup> Jadi, anak yang berkebutuhan khusus dapat menjalani pendidikan formal bersama anak-anak lainnya dan juga meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 1

<sup>4</sup> Profil Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010, Hlm 2

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelaianan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan tentang peserta didik yang dapat diterima di sekolah inklusi. Kelain yang dijelaskan pada Permandiknas nomor 70 tahun 2009 antara lain :

- a) tunanetra;
- b) tunarungu;
- c) tunawicara;
- d) tunagrahita;
- e) tunadaksa;
- f) tunalaras;
- g) berkesulitan belajar;
- h) lamban belajar;
- i) autisme;
- j) memiliki gangguan motorik;
- k) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- l) memiliki kelainan lainnya;
- m) tunaganda

Sekolah yang melakukan atau membuka kelas inklusi harus dapat menangani jenis-jenis kebutuhan anak yang telah dijelaskan pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tersebut. Dalam hal ini sekolah harus dapat menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Tidak hanya itu, sekolah juga harus menyediakan tenaga kerja atau guru yang dapat menangani ABK tersebut.

Tidak hanya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, adapun Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur yang bertujuan:

“memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”<sup>5</sup>

Hal ini memperkuat adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Timur. Pada pasal 7 Bab III tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif mengatakan bahwa:

“Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menyediakan: a) Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b) Sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.”<sup>6</sup>

Di Provinsi Jawa Timur, Kota Batu merupakan salah satu kota yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 17 tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pada pasal 13 tentang Hak Peserta Didik ayat 4 menjelaskan, “*Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.*”<sup>7</sup> Dari Perda tersebut ABK dapat mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan secara formal sesuai dengan kebutuhannya.

Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) Batu Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu. Kewajiban

---

<sup>5</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur, Pasal 2 ayat 1

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

pemerintah Kota Batu dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pun diatur pada pasal 6 dan pasal 7 yang menyatakan bahwa :

#### Pasal 6

“1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penjaminan bahwa semua implementasi pendidikan inklusif dibantu secara operasional dan professional; 2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dibiayai oleh Pemerintah Daerah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem dukungan pendidikan inklusif; 3) Pemerintah Daerah membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.”<sup>8</sup>

#### Pasal 7

“1) Pemerintah Daerah menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan yang berada pada tiap Kecamatan di wilayah Kota Batu diselenggarakan secara inklusif; 2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah kota Batu; 3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.”<sup>9</sup>

Pendidikan inklusif pada tingkat SD di Kota Batu pun telah diselenggarakan mulai tahun 2004. Awal mula pembentukan kelas-kelas inklusif ini dikarenakan kebutuhan agar meratanya pendidikan di Kota Batu khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2004 hanya terdapat satu SLB di Kota Batu yang jaraknya cukup jauh untuk peserta didik. Dinas Pendidikan (Dispen) Kota Batu pun menunjuk 5 sekolah dasar untuk dapat membuka kelas inklusif tersebut .

Sekolah yang ditunjuk pun sebenarnya tidak siap untuk membuka kelas inklusif tersebut. penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota batu pada tahun 2004 dikarenakan adanya kebutuhan yang memaksa harus adanya penyelenggaraan

---

<sup>8</sup> Peraturan Walikota Batu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 6

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 7



pendidikan inklusif yang harus berjalan. Dinas Pendidikan Kota Batu pun membantu dengan cara mengkontrak tenaga pendidik ahli untuk dapat menangani ABK tersebut. Adapun Kota Batu pada tahun 2004/2005 masih dalam tahap percobaan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Seperti hasil wawancara yang dikatakan oleh Koordinator GPK Junrejo 01.

“... Pada tahun 2009 itu Kota Batu juga diberikan jalan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pada awalnya adanya pendidikan inklusi di kota Batu pada tahun 2005 sebagai bahan percobaan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi dan berjalannya pun pada tahun 2006 ...”<sup>10</sup>

Pada tahun 2013 Kota Batu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) inklusif untuk dapat membantu Dispen Kota Batu dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pokja memiliki keanggotaan dari kepala sekolah dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Adapun tugas dari Pokja memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada tahun 2014 Kota Batu pun mendeklarasikan sebagai kota inklusif. Kota Batu pada awalnya memiliki 5 sekolah yang mengadakan pendidikan inklusif. Pada saat ini Kota Batu telah memiliki 17 sekolah dasar negeri dan 1 sekolah dasar swasta. Senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja.

“Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu mulai dari tahun 2013 mulai ada perkembangan yang sangat signifikan. Kenapa? dapat dikatakan seperti itu karena kita membentuk Pokja (Kelompok Kerja) inklusi se Kota Batu. Setelah itu di tahun 2014, kita adakan deklarasi inklusif di Kota Batu, jadi Kota Batu adalah sebagai kota inklusi. Sehingga penyelenggara pendidikan inklusif tadiya hanya 6 atau 5 sekolah, sekarang menjadi 8 sekolah.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 maret pukul 09.05 WIB



Itupun di sekolah dasar yang paling banyak. Sekolah dasar itu ada sekitar 18 sd, dimana semua sd inti dan 6 sekolah inklusif yang awal ... Kelompok Kerja itu fungsinya memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan inklusif yang ada di Kota Batu.”<sup>11</sup>

Pada tahun 2012 terdapat 2 sekolah dasar yang membuka kelas inklusif dan pada tahun 2014 terdapat 11 sekolah dasar yang membuka kelas inklusif. Daftar Sekolah Dasar yang telah membuka kelas inklusif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Kota Batu**

NO	TAHUN	NAMA / JENJANG SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STATUS SEKOLAH
1	2004	SDN MOJOREJO 01	JL. RAYA MOJOREJO 86	NEGERI
2		SDN JUNEREJO 01	JL. HASANUDIN 57 JUNREJO	NEGERI
3		SDN JUNEREJO 02	JL. RAYA JENREJO 6	NEGERI
4		SDN TLEKUNG 01	JL. RAYA TLEKUNG 15	NEGERI
5		SDN TLEKUNG 02	JL. RAYA TLEKUNG 15	NEGERI
1	2012	SD MUHAMMADIYAH 04	JL. WELIRANG 17	SWASTA
2		SDN BULUKERTO 02	JL. IMAM SUJONO 67 BATU	NEGERI
1	2014	SDN SIDOMULYO 01	JL. BUKIT BERBUNGA 70	NEGERI
2		SDN SISIR 03	JL. IMAM BONJOL III/9	NEGERI
3		SDN SISIR 05	JL. ARJUNO 40C	NEGERI

<sup>11</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52 WIB

4	SDN SONGGOKERTO 01	JL. TRUNOJOYO 24	NEGERI
5	SDN ORO-ORO OMBO 02	JL ORO-ORO OMBO 36	NEGERI
6	SDN TULUNGREJO 04	JL RAYA JUNGGO GABES	NEGERI
7	SDN PUNTEN 01	JL RAYA PUNTEN 24	NEGERI
8	SDN BULU KERTO 01	JL. KENANGA	NEGERI
9	SDN GIRIPURNO	JL. DUKUH KRAJAN	NEGERI
10	SDN BEJI 01	JL. RAYA BEJI 42	NEGERI
11	SDN DADAPREJO 01	JL. DADAPREJO	NEGERI

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 tentang sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sekolah dasar Kota Batu dapat dilihat adanya perkembangan dari tahun 2004 sampai tahun 2014 dengan meningkatnya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan Kota Batu pun melakukan sosialisai agar SD yang lainnya dapat membuka kelas-kelas untuk ABK tersebut. Dinas pendidikan Kota Batu pun memberikan *workshop* kepada tenaga pendidik yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif ini agar dapat menambah pengetahuan dan juga penangan yang tepat kepada ABK.

Peneliti tertarik untuk mengambil penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dikarenakan masih adanya ketidaktahuan masyarakat umum tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini masih sangat jarang terdengar masyarakat luas, masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa ABK di sekolahkan pada

lembaga-lembaga pendidikan khusus. Pada kenyataannya terdapat sekolah sekolah regular yang dapat menerima ABK dalam proses pembelajaran.

*Kedua*, implementasi pendidikan inklusif di kota Batu masih memiliki beberapa masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik khusus yang terdapat pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Hal ini dapat dilihat bahwa ada beberapa sekolah seperti Sekolah Dasar Negeri Junrejo 01 yang memiliki 28 siswa ABK dan hanya memiliki 4 guru pembimbing khusus di dalam sekolah. Kemudian masih terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif agar efektifnya proses belajar anak berkebutuhan khusus.

*Ketiga*, sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus bertempat sangat jauh dari daerah-daerah atau kecamatan. Masalah ini menyebabkan anak-anak yang berada jauh dengan sekolah khusus akan menghadapi kesulitan dengan jarak tempuh untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Adapun penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga dapat memberikan kesempatan kepada ABK bersekolah dekat dari tempat tinggalnya.

*Ke-empat*, peneliti juga tertarik dengan proses implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Melihat Kota Batu pun telah menyelenggarakan pendidikan inklusi dari tahun 2004, akan tetapi peraturan walikota Batu tentang pendidikan inklusif ada pada tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Walikota

Batu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yang menandakan telah berjalannya pendidikan inklusif itu sendiri. Peneliti ingin melihat apakah proses implementasi yang diadakan telah berjalan dengan baik.

*Ke-lima*, peneliti juga ingin mengetahui seperti apa sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif ini dari segi fasilitas, tenaga pendidik, proses pengajaran untuk ABK, dan tanggapan dari anak-anak *non* ABK yang ikut dalam proses belajar bersama peserta didik ABK. Adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif juga membangun mental dari ABK dan *non* ABK agar tidak adanya diskriminasi terhadap ABK pada saat telah terjun ke dalam masyarakat pada umumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ingin dicapai oleh penulis adalah: Bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin menjelaskan tujuan dibuatnya penelitian ini. Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk peningkatan mutu pendidikan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat secara akademis dan juga manfaat secara praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan ada kontribusi berupa ilmu dalam hal peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Memperoleh pengembangan pengetahuan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sedang berlangsung.
- c. Sebagai pelengkap bagi penelitian yang memiliki tema serupa.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memperoleh hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat mengenai implementasi pendidikan inklusif di Kota Batu pada tingkat sekolah dasar
- b. Memotivasi masyarakat dan pemerintah untuk terus bekerjasama yang terus-menerus dalam meningkatkan efektifitas pendidikan.

- c. Sebagai acuan pemerintah daerah lain dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pendidikan inklusif agar dapat berkerja secara efektif dan efisien.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti mencantumkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan dan tambahan pengetahuan peneliti. Pada sub pembahasan selanjutnya peneliti juga menjelaskan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep yang digunakan peneliti menjadi dasar analisis untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada di bab sebelumnya.

Penggunaan konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Selain menjelaskan konsep yang digunakan, penelitian ini dilengkapi pula dengan alur pikir. Penyajian alur pikir dalam bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan kerangka berpikir sampai pemecahan masalah dan solusi agar pembaca dapat dengan mudah memahami alur penelitian dalam skripsi ini.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penulis menjelaskan tentang studi atau penelitaian terdahulu yang memiliki perbedaan disetiap penelitiannya. Peneliti akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil dari penelitian terdahulu akan dijadikan bahan acuan bagi penulis dalam menjalankan proses penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini Sudarto dengan judul “*Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*”.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di Kota Surabaya. Peneliti menjelaskan tentang implementasi pendidikan inklusif di 3 SD dan 3 SMP dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif. Penulis menggunakan teori implementasi dari *Merilee S. Grindle*. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dampak yang baik untuk orangtua ABK. Pergup Jatim juga perlu meningkatkan kualitas pada tenaga Bimbingan Konseling (BK), pelaksana kebijakan, tenaga terapis yang belum dialokasikan, dan SDM untuk Guru Pendidik Khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugianto dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Plaosan Dan Sekolah Dasar Negeri Pojok Daerah Istimewa Yogyakarta*”.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2015. Pendekatan yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi dari *Merilee S. Grindle*. Peneliti menemukan sekolah telah menyelenggarakan pendidikan inklusif dan mengikuti peraturan dari Dinas Pendidikan.

Sekolah pun telah menjalankan programnya akan tetapi, masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan masih ada program yang tidak berjalan dengan baik. Adapun, faktor yang mendukung dari implementasi pendidikan inklusif ini berasal dari Dinas

---

<sup>1</sup> Zaini Sudarto. 2016. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Surabaya.

<sup>2</sup> Sugianto. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Plaosan Dan Sekolah Dasar Negeri Pojok Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.

pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta dengan mengadakan workshop khusus untuk pihak sekolah yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya, faktor penghambat yang ditemui oleh peneliti adalah fasilitas untuk penyelenggaraan yang masih kurang memadai meliputi, media terapi, ruangan bimbingan khusus, dan alat peraga khusus. Sekolah pun memiliki program menambahkan jam pelajaran kepada ABK setelah pulang sekolah 2 kali dalam seminggu

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Kurnia Darmawanti dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SD Trirenggo Dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul”.<sup>3</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Kab. Bantul, Jawa Timut pada tahun 2017. Penelitaian ini menjelaskan implementasi pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kab. Bantul. Penelitaian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Horn dan Van Mater.

Penelitian ini menemukan bahwa SD Trirenggo telah melaksanakan pendidikan inklusif di sekolahnya. Sarana dan prasana yang dimiliki pun telah dapat dikatakan mencukupi untuk menjalankan pendidikan inklusif. guru pun melakukan pelatihan untuk dapat mendidik ABK sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Dapun faktor yang mendukung dari SD 1 Trirenggo adalah semua guru yang berada di dalam sekolah telah terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, kurikulum yang digunakan pun

---

<sup>3</sup> Tri Kurnia Darmawanti. 2017. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SD Trirenggo Dan SD Kapuhan Kabupaten Bantul*. Yogyakarta

telah diubah untuk dapat menyesuaikan kebutuhan ABK, penilaian yang dilakukan pun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa ABK, siswa ABK dan siswa reguler telah berinteraksi dengan baik didalam lingkungan sekolah. Sedangkan faktor yang mendukung di dalam SD Kepuhan adalah sama dengan apa yang telah dijelaskan pada SD 1 Tirenggo.

Adapun faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan ini adalah masih sukarnya mendapatkan guru pembimbing khusus, guru lain pun kurang serius dalam menanggapi dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan sarana yang kurang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan SD 1 Tirenggo, SD Kepuhan memiliki hambatan guru yang kurang maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, selain itu pihak sekolah bersama orang tua kurang memiliki peran.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Pratiwi dengan judul “*Implementasi Pendidikan Inklusif Di Kota Metro*”.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dijelaskan oleh Van Meter Van Horn. Penelitian ini pun menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Lokasi dari penelitian ini di Kota Metro Provinsi Lampung pada tahun 2014.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan inklusif belum maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki. Hal ini terbukti dari masih banyaknya hambatan yang menyangkut masalah teknis didalam

---

<sup>4</sup> Indah Pratiwi. 2014. *Implementasi Pendidikan Inklusif Di Kota Metro*. Lampung.

penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilakukan di sekolah yang berada di Kota Metro. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah melakukan perbaikan dalam hal sosialisasi mengenai pendidikan inklusif ke masyarakat agar dalam berjalannya kebijakan akan mengurangi kendala yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Chita Faradilla A dengan judul “*Penerapan Pendidikan Inklusif Pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kelompok A (Studi Kasus Di Komimo Playschool Yogyakarta)*”.<sup>5</sup> Jenis dari penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini pun mengumpulkan data dengan cara menganalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan konsep tentang pendidikan inklusif.

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua peserta didik tanpa melihat perbedaan yang ada pada diri masing-masing. Hal ini terbukti dengan adanya kelas yang terdiri dari beragamnya siswa, siswa pun mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya, kemudian kurikulum yang digunakan pun telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik, dan pembelajaran yang focus untuk mengembangkan; Bahasa, moral dan sosial emosional anak.

---

<sup>5</sup> Chita Faradilla A. 2013. *Penerapan Pendidikan Inklusif Pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kelompok A (Studi Kasus Di Komimo Playschool Yogyakarta)*. Yogyakarta.



**Tabel 2.1**

**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PEMBEDA
1	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di Kota Surabaya. Peneliti menjelaskan tentang implementasi pendidikan inklusif di 3 SD dan 3 SMP dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif. Penulis menggunakan teori implementasi dari <i>Merilee S. Grindle</i> . Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dampak yang baik untuk orangtua ABK. Pergup Jatim juga perlu meningkatkan kualitas pada tenaga Bimbingan Konseling (BK), pelaksana kebijakan, tenaga terapis yang belum dialokasikan, dan SDM untuk Guru Pendidik Khusus.	Teori dan lokasi penelitian
2	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Plaosan Dan Sekolah Dasar Negeri Pojok Daerah Istimewa Yogyakarta	Peneliti menemukan sekolah telah menyelenggarakan pendidikan inklusif dan mengikuti peraturan dari Dinas Pendidikan. Sekolah pun telah menjalankan programnya akan tetapi, masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan masih ada program yang tidak berjalan dengan baik. Adapun, faktor yang mendukung dari implementasi pendidikan	Teori dan lokasi penelitian



		<p>inklusif ini berasal dari Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta dengan mengadakan workshop khusus untuk pihak sekolah yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya, faktor penghambat yang ditemui oleh peneliti adalah fasilitas untuk penyelenggaraan yang masih kurang memadai meliputi, media terapi, ruangan bimbingan khusus, dan alat peraga khusus. Sekolah pun memiliki program menambahkan jam pelajaran kepada ABK setelah pulang sekolah 2 kali dalam seminggu</p>	
3	<p>Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SD Trirenggo Dan SD Kapuhan Kabupaten Bantul</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa SD Trirenggo telah melaksanakan pendidikan inklusif di sekolahnya. Sarana dan prasana yang dimiliki pun telah dapat dikatakan mencukupi untuk menjalankan pendidikan inklusif. guru pun melakukan pelatihan untuk dapat mendidik ABK sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Adapun faktor yang mendukung dari SD 1 Trirenggo adalah semua guru yang berada di dalam sekolah telah terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, kurikulum yang digunakan pun telah diubah untuk dapat menyesuaikan kebutuhan ABK, penilaian yang dilakukan pun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa ABK, siswa ABK dan siswa reguler telah berinteraksi</p>	<p>Teori dan lokasi penelitian</p>

		<p>dengan baik didalam lingkungan sekolah. Sedangkan faktor yang mendukung di dalam SD Kepuhan adalah sama dengan apa yang telah dijelaskan pada SD 1 Trirenggo. Adapun faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan ini adalah masih sukarnya mendapatkan guru pembimbing khusus, guru lain pun kurang serius dalam menanggapi dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan sarana yang kurang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan SD 1 Trirenggo, SD Kepuhan memiliki hambatan guru yang kurang maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, selain itu pihak sekolah bersama orang tua kurang memiliki peran.</p>	
4	Implementasi Pendidikan Inklusif Di Kota Metro	<p>Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan inklusif belum maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki. Hal ini terbukti dari masih banyaknya hambatan yang menyangkut masalah teknis didalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilakukan di sekolah yang berada di Kota Metro. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah melakukan perbaikan dalam hal sosialisasi mengenai pendidikan inklusif ke masyarakat agar dalam berjalannya kebijakan akan mengurangi kendala yang dihadapi.</p>	Teori dan lokasi penelitian

5	Penerapan Pendidikan Inklusif Pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kelompok A (Studi Kasus Di Komimo Playschool Yogyakarta)	Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua peserta didik tanpa melihat perbedaan yang ada pada diri masing-masing. Hal ini terbukti dengan adanya kelas yang terdiri dari beragamnya siswa, siswa pun mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya, kemudian kurikulum yang digunakan pun telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik, dan pembelajaran yang focus untuk mengembangkan; Bahasa, moral dan sosial emosional anak.	Teori dan lokasi penelitian
---	--	--	-----------------------------

*Sumber Data: Data Dioleh Oleh Peneliti. 2017*

## 1.2 Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik sangat diperlukan untuk menganalisa suatu laporan penelitian penulis. Kerangka teoritik merupakan pijakan utama sebagai mata pisau suatu analisis penelitian. Oleh karena itu disini penulis dalam menyelesaikan penelitian menggunakan kerangka teori yaitu teori implementasi kebijakan publik.

### 1.2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan sebuah proses dari sebuah kebijakan publik. Kebijakan dapat dipahami sebagai sebuah keputusan yang diambil untuk menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Menurut Anderson, mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau

sekelompok aktor berkenan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.<sup>6</sup> Jadi sebuah kebijakan ada dikarenakan sebuah masalah yang diselesaikan dengan sebuah keputusan untuk diikuti oleh sekelompok atau seseorang. Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi merupakan langkah yang penting dari sebuah proses kebijakan. Tidak adanya implementasi, kebijakan yang telah ada hanya sebatas rencana yang tidak dijalankan. Implementasi menurut Solichin Abdul Wahab,<sup>7</sup> yaitu:

“Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoprasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), dan Teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki”.

Jadi adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi dan terikat oleh sebuah peraturan undang-undang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

*“Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% keberhasilan, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.”*<sup>8</sup> Adanya masalah atau hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan merupakan hal yang biasa terjadi. Harus adanya model implementasi yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Model

<sup>6</sup> Muchlis Hamid, *Kebijakan Publik: Proses, Analisa, Dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hlm 36

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm 133

<sup>8</sup> Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008, Hlm 625

tersebut menampilkan variabel-variabel yang harus dilihat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Model implementasi menurut Edward III memiliki empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah implementasi. “*Empat variabel atau faktor tadi diantara lain meliputi faktor communication (komunikasi), resource (sumber daya), disposition (disposisi), dan bureaucratic structure (struktur birokrasi).*”<sup>9</sup>

#### a) Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi yang disampaikan sangatlah penting dikarenakan para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa saja isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan yang telah direncanakan. Komunikasi ini juga berpengaruh untuk keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan, apabila komunikasi yang tidak baik antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan maka akan terjadinya salah sasaran dari kebijakan tersebut.

Ada faktor di dalam komunikasi kebijakan yang dapat menimbulkannya komunikasi yang tidak konsisten dan dapat menimbulkannya dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. “*Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, kejelasan, dan konsistensi.*”<sup>10</sup> Faktor penghambat komunikasi pertama merupakan

---

<sup>9</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm 96

<sup>10</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, CAPS (Center of Academic Publisng Service) Yogyakarta, 2013, Hlm 179



transmisi. Terkadang terjadinya pertentangan pendapat terhadap pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan yang mengakibatkan terhambatnya sebuah kebijakan. Adapun informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi yang sangat rumit pula dapat mempengaruhi efektifitas komunikasi kebijakan yang dilakukan. Tidak hanya itu, pelaksana kebijakan pun harus dapat memahami informasi yang disampaikan yang sampai terjadi menduga-duga makna dari informasi yang disampaikan.

Faktor penghambat komunikasi kedua yaitu kejelasan. Agar kebijakan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus jelas tersampaikan kepada pelaksana kebijakan. Ketidakjelasan informasi akan mengakibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai harapan dari rencana awalnya.

Faktor penghambat komunikasi ketiga yaitu konsistensi. Apabila implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka pelaksanaannya harus konsisten dan jelas. Informasi yang jelas memang sangat berpengaruh akan tetapi informasi yang jelas tidak diikuti dengan perintah-perintah yang konsisten akan menimbulkan masalah dalam sebuah kebijakan yang sedang berlangsung.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini harus adanya komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Batu dan juga sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Apabila tidak adanya komunikasi yang baik antara lembaga-lembaga yang terkait, implementasi kebijakan ini tidak akan memenuhi target yang diinginkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Maka dari itu komunikasi dalam menjalankan kebijakan merupakan hal penting.



### b) Sumber Daya

Sumber daya meliputi dua aspek yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. *Pertama*, sumber daya manusia adalah para pelaksana kebijakan. Edward III dalam Joko Widodo, menegaskan bahwa “*Probably the most essential resources in implementing policy is staff*”<sup>11</sup> (Mungkin sumber yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf). Dari pernyataan tersebut staf atau pelaksana kebijakan penting adanya dikarenakan, para pelaksana merupakan penggerak dari kebijakan agar dapat berjalan. Sumber daya manusia juga harus mempunyai keahlian dan juga kemampuan dalam kebijakan yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itu sumber daya manusia sangat penting dalam berjalannya sebuah kebijakan publik

*Kedua*, sumber daya anggaran merupakan biaya agar dapat terlaksananya kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran berguna membiayai peralatan yang dibutuhkan dan juga membiayai agen pelaksana kebijakan. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif karena adanya biaya yang sesuai dengan keperluan dalam menjalankan kebijakan.

Sumber daya merupakan variabel yang sama pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya manusia selaku penjalan kebijakan pendidikan inklusif ini merupakan hal yang paling penting dikarenakan harus adanya tenaga ahli untuk dapat mendidik ABK yang mengikuti proses belajar. Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang harus dimiliki sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif juga harus memadai,

---

<sup>11</sup> Joko Widodo, *op. cit*, Hlm 98.

menil实现 anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan fasilitas untuk menunjang proses belajar yang dilakukan.

**c) Disposisi**

Disposisi merupakan kemauan atau kesungguhan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Keahlian dari implementor tidak mencukupi apabila tidak adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Adanya pemahaman tentang pentingnya kebijakan yang sedang dilakukan oleh agen pelaksana dapat menimbulkan kemauan dan sikap yang peduli dengan kebijakan yang sedang dijalani.

Perilaku dari penyelenggara kebijakan juga harus memiliki sikap yang peduli dengan keberlangsungan kebijakan ini. Harus adanya perhatian yang lebih dari pihak pemerintah dan sekolah selaku penyelenggara pendidikan inklusif. Pemerintah harus memberikan sosialisasi dan juga materi agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah pun harus lebih memperhatikan ABK agar mengeluarkan potensi dan bakat yang dimilikinya.

**d) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III. Walaupun hanya dengan komunikasi, sumber daya, dan disposisi implementasi dapat dijalankan akan tetapi, tidak adanya struktur birokrasi akan berakibat tidak berhasilnya sebuah implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, *“implementasi/pelaksanaan kebijakan bisa jadi belum efektif/berhasil karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi (defeciencies in*

*bureaucratic structure*).”<sup>12</sup> Apabila struktur birokrasi tidak efisien akan timbul perpecahan antara organisasi dan kegagalan juga dapat meningkatkan dalam berkomunikasi. Struktur birokrasi yang efisien akan menciptakan mekanisme, sistem dan prosuder pelaksanaan yang dapat mencapai tujuan atau keberhasilan implementasi kebijakan.

“Menurut Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan *Standard Operation Prucedurs (SOP)* dan fragmentasi.”<sup>13</sup> SOP merupakan prosedur kerja ukuran dasar yang merupakan aspek yang penting dalam struktur sebuah organisasi. SOP dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar yang dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan. Keuntungan dengan adanya SOP dapat mengontrol sebuah kebijakan dengan mudah.

Kemudian fregmentasi ialah penyebaran tanggung jawab kepada satuan-satuan kerja atau organisasi-organisasi. “*Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara organisasi-organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.*”<sup>14</sup> Akan tetapi fragmentasi ini dapat menjadi penghambat dari sebuah kebijakan karena badan-badan yang menghambat koordinasi dari kebijakan demi kepentingan-kepentingannya

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 106

<sup>13</sup> Budi Winarno, *op. cit.* Hlm 206

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm 209

sendiri. Akibat yang terburuk adalahnya terpecah-belahnya struktur birokrasi tersebut. Semakin besar koordinasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan maka semakin besar pula kemungkinan dalam keberhasilannya.

Struktur birokrasi merupakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga juga hal yang harus diperhitungkan agar kebijakan yang sedang diselenggarakan menjadi lebih efisien. Harus adanya SOP agar dapat memilah sekolah yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. SOP merupakan bentuk dari struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan.

### 1.2.2 Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif

Dalam implementasi kebijakan publik ada variabel-variabel untuk dapat melihat apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak pada saat pelaksanaannya, pendidikan inklusif juga mempunyai komponen-komponen agar mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan teori yang telah disebutkan oleh penulis komponen ini menunjang dalam penelitian implementasi pendidikan inklusif. Ada enam komponen agar terciptanya keberhasilan pendidikan inklusif yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Fleksibilitas kurikulum (bahan ajar).
2. Tenaga pendidik (guru)
3. Input peserta didik
4. Lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif
5. Sarana dan prasarana
6. Evaluasi pembelajaran

---

<sup>15</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016, Hlm 167-187

Fleksibilitas kurikulum (bahan ajar), pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. ABK yang memiliki kemampuan akademik rata-rata menggunakan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal dan anak yang memiliki kemampuan akademik dibawah rata-rata memerlukan kurikulum modifikasi. Kurikulum yang telah ada harus dimodifikasi untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan ABK yang mengikuti proses belajar.

Kurikulum yang telah dimodifikasi modifikasi yaitu mengurangi tingkat kesulitan pada materi atau bahan ajar atau dihilangkan bagian tertentu. Strategi dalam mengajar pun perlu penyesuaian, salah satu trateginya adalah *Positive Behavioral Support* (PSB) untuk anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Media pembelajaran pun ikut menyesuaikan dengan kebutuhan ABK agar tenaga pendidik dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh ABK.

Tenaga pendidik (guru), dalam hal ini guru harus punya kemampuan untuk dapat menangani peserta didik ABK maupun *non* ABK. Kemampuan yang dimaksud adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap materi yang akan diajarkan, dan memahami karakteristik siswa. Guru merupakan salah satu aktor yang bersentuhan langsung dengan sasaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Maka dari itu tenaga pendidik juga harus dapat memotivasi peserta didik agar dapat meningkatkan kemampuan siswanya



Input peserta didik, didalam sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif semua peserta didik juga terlibat untuk dapat mengelola kegiatan pembelajaran agar dapat terciptanya lingkungan sekolah yang baik. Input peserta didik juga dalah bagaimana penyelenggara mengidentifikasi peserta didik dengan kebutuhan yang ada untuk dapat memberikan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Peserta didik dilatih untuk dapat bersosialisasi di lingkungan sekolah agar ABK tidak seperti dibedakan dengan peserta didik yang lainnya. Maka dari itu input dari peserta didik juga termasuk dalam komponen keberhasilan pendidikan inklusif.

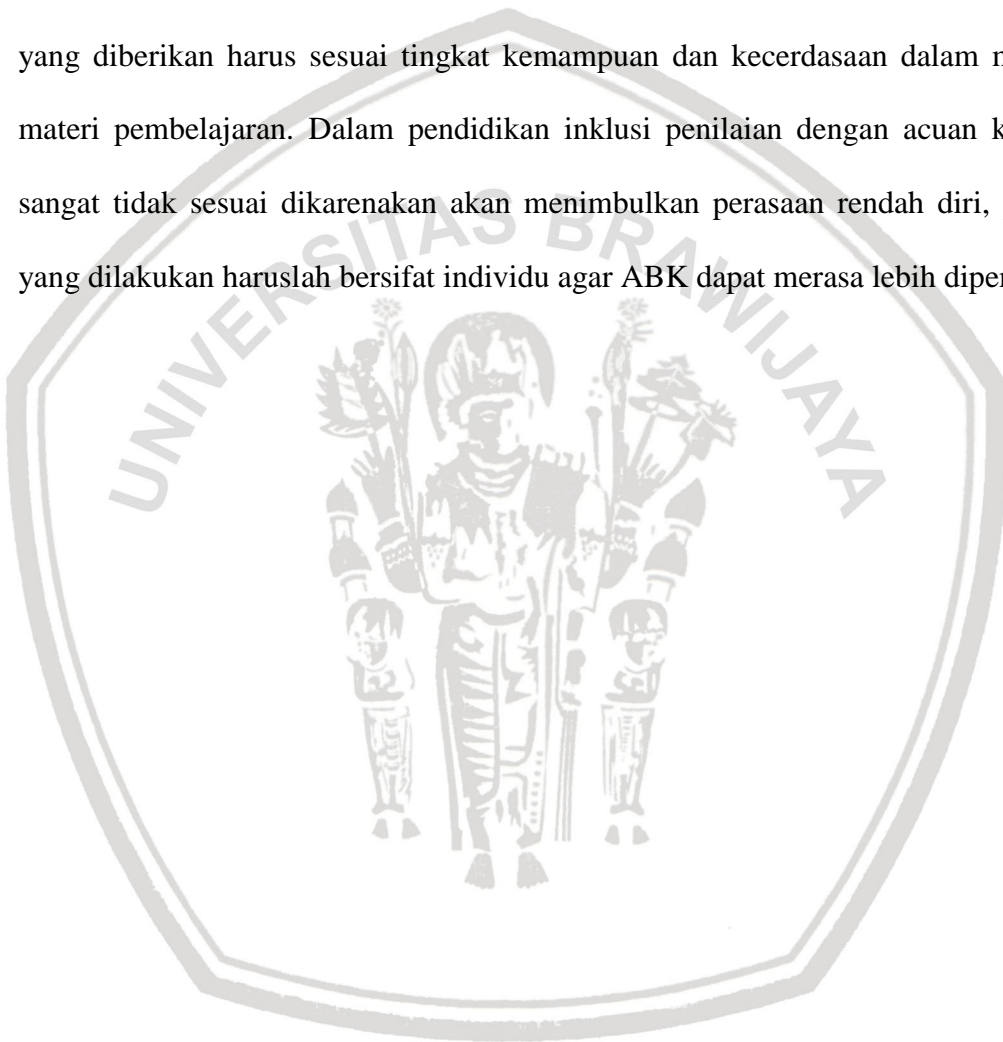
Lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif, dalam hal ini harus adanya peran dari orangtua murid, pemerintah, dan sekolah. Orangtua sangat menentukan peningkatan motivasi dan kepercayaan diri anak. Orangtua harus aktif berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah. Ada pun pemerintah merupakan pengatur kebijakan, pemberi anggaran kepada sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan dalam proses mengajar, memonitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi kepada masyarakat. Sementara sekolah merupakan pelaksana yang memberikan motivasi dan juga mengembangkan potensi anak secara langsung.

Sarana dan prasarana, dapat diketahui ABK membutuhkan perhatian lebih untuk dapat mengetahui potensi yang dimilikinya. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki juga membutuhkan sarana dan prasarana dari segi fasilitas fisik maupun



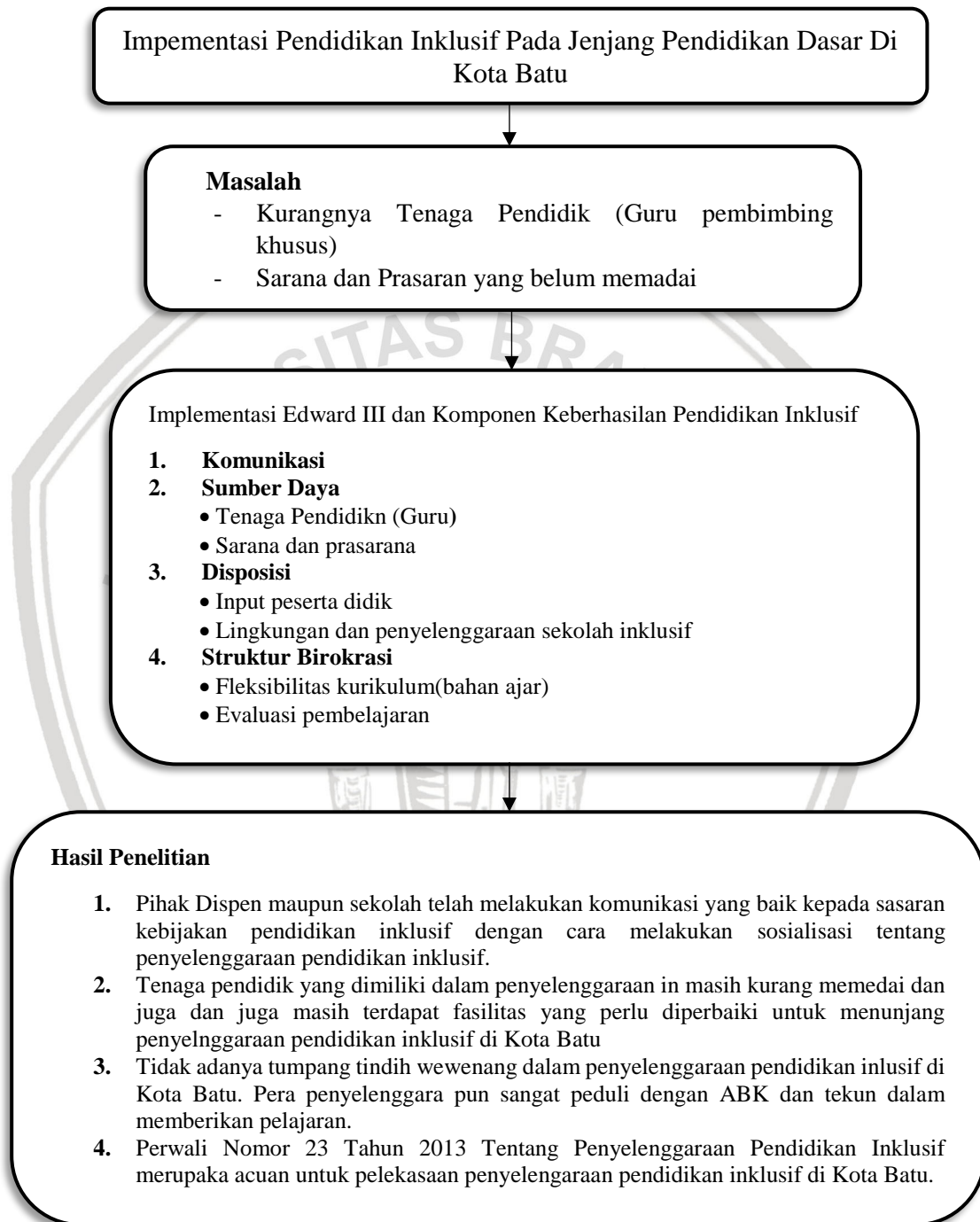
fasilitas uang. Hal tersebut diperukan agar dapat meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Evaluasi pembelajaran, penilaian sekolah kepada peserta didik. Pada umumnya sekolah akan memberikan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir dikarekan seragamnya peserta didiki yang dimiliki. Akan tetapi untuk bagi ABK jenis evaluasi yang diberikan harus sesuai tingkat kemampuan dan kecerdasan dalam menerima materi pembelajaran. Dalam pendidikan inklusi penilaian dengan acuan kelompok sangat tidak sesuai dikarenakan akan menimbulkan perasaan rendah diri, penilaian yang dilakukan haruslah bersifat individu agar ABK dapat merasa lebih diperhatikan.



## 2.3 Alur Pemikiran

### 2.1 Bagan Alur Pikir



Sumber : *Data diolah oleh penulis, 2018*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. Pada bab ini akan terbagi beberapa bagian yaitu: 1) jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti; 2) jenis data; 3) cara teknik pengumpulan data; dan 4) sistematika dari penulisan dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan penulis menganggap tema penelitian yang sejalan dengan jenis penelitian ini. Data yang digunakan pun menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berada di lapangan. Tidak hanya itu, dalam bab ini pula peneliti akan menjelaskan tentang teknik analisis dan sistematika penulisan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi ini sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat kurang, tidak seimbangnya jumlah GPK dengan murid ABK yang dimiliki setiap sekolah di Kota Batu. Dalam hal sumber daya finansial pun masih kurang memadai, adanya bantuan yang dimiliki Pokja sebesar 100 juta rupiah untuk dapat menjalankan program-program yang ada telah dihapuskan. Dana yang ada hanyalah BOS untuk murid-murid pada umumnya.

Dalam hal disposisi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu, para pelaksana kebijakan sangat peduli dengan ABK. Dispen dan Pokja inklusi selalu meningkatkan mutu dari pelayanan pendidikan khususnya pendidikan inklusif. GPK pun sangat tekun dan sabar dalam mendidik ABK.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu prosedur dalam penyelenggaraan telah diatur dalam Perwali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Selanjutnya tidak berbelitnya struktur organisasi yang dimiliki membuat fleksibelnya organisasi dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Adapun kurikulum yang digunakan pun telah fleksibel, guna menyesuaikan tingkat kemampuan ABK. tidak hanya itu evaluasi pembelajarannya pun telah menyesuaikan dengan kemampuan anak yang dimiliki. Dalam struktur organisasi tidak adanya tumpang tindih antara Dispen, Pokja, maupun sekolah.

### 3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Kegunaan penelitian kualitatif ini untuk memahami suatu kondisi tertentu dan memperdalam teori yang digunakan. Penelitian ini membahas tentang implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar. Oleh karena itu penulis ingin menghasilkan gambaran yang ada dilapangan dan data yang diperoleh sesuai dengan penelitian ini. *“Tujuan penelitian kualitatif yakni untuk mencari dan mengembangkan sebuah teori. Inti dari penelitian kualitatif adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan struktur fenomena serta peristiwa dalam konteks alaminya.”*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jan Joker, dkk. *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat. 2011. Hlm 75-76

Penelitian deskriptif merupakan penelitian pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang adekuat.<sup>2</sup> Oleh karena itu berhubungan dengan konteks tema yang ada mengenai Pendidikan Inklusif bahwa didalam penelitian deskriptif ini berguna untuk membantu menyelesaikan masalah yang diteliti.

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada obyek penelitian yakni di kantor Dinas Pendidikan Kota. Tepatnya kantor Dinas Pendidikan Kota Batu jalan Panglima Sudirman no. 507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, kode pos 65313. Lokasi penelitian lainnya adalah sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Batu.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berfungsi bagi peneliti untuk dapat mengambil keputusan dan juga memudahkan untuk dapat memisahkan data yang relevan digunakan maupun data yang tidak relevan untuk digunakan penelitian ini. Oleh karena itu fokus penelitian sangat penting dalam hal untuk mengolah data sampai penarikan kesimpulan. Adapun fokus pada penelitian ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi penelitian memiliki kesinambungan

---

<sup>2</sup>Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press. 2005 Hlm 31

terhadap fokus penelitian yang bertujuan untuk memaksimalkan validitas dan kualitas hasil penelitian.

### 3.4 Jenis Data

Data yang diperoleh sangat penting bagi peneliti dalam menjalani proses penelitian. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

- a) *“Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama yang tingkat orisinalitas datanya sangat tinggi. Data primer juga merupakan sumber-sumber bukti yang ada.”*<sup>3</sup> Wawancara struktur yang dilakukan kepada pihak yang kompeten dalam bidangnya. Tema penelitian yang diangkat serta dokumentasi dari observasi yang dilakukan peneliti. Data primer yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara terstruktur dengan Dinas Pendidikan Kota Batu dan tokoh lainnya.
- b) Jenis data kedua yang digunakan penulis selanjutnya ialah data sekunder. Menurut Hasan, data sekunder sendiri bisa diartikan sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber ke sumber yang telah ada.<sup>4</sup> Jadi, data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang tidak didapatkan secara langsung oleh penulis di lapangan. Jenis data ini berfungsi sebagai penunjang data primer yang

---

<sup>3</sup> Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003 Hlm 50

<sup>4</sup> Hasan, M, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm 52



sudah ada, diantaranya ialah peraturan perundang-undangan, data dinas, dan lain sebagainya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian untuk mendapatkan data yang relevan. Banyak cara yang dapat dilakukan peneliti dalam mengambil data dan menghindari subjektivitas. Peneliti harus cermat dalam pengumpulan data karena berpengaruh pada hasil penelitian. Teknik yang digunakan peneliti yaitu melalui observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara terstruktur dan dokumentasi lapangan.

#### 3.4.1 Observasi

Metode observasi menjadi amat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Melalui observasi itulah dikenali beberapa rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang berupa sebuah pola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan observasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar, begitu pula sejumlah suasana yang dirasakan (tertangkap oleh indera perasaan).<sup>5</sup>

Observasi dapat disebut juga sebagai proses untuk dapat melihat/mengamati dan juga pencatatan secara sistematis/terstruktur terhadap permasalahan yang muncul pada sasaran penelitian. Pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bedanya adalah jika pengamatan langsung untuk melihat realita yang ada

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 65-66.

dilapangan dan mencatat segala kejadian yang muncul di waktu saat berlangsungnya suatu kejadian dengan pengelihan dari peneliti itu sendiri. Pengamatan tidak langsung yaitu melihat suatu realita yang ada dilapangan tidak pada saat berlangsungnya kejadian yang akan diteliti. Peneliti menggunakan observasi langsung karena peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi tetapi untuk proses kejadian peristiwanya tidak langsung karena terjadi beberapa tahun lalu.

### 3.4.2 Wawancara

Wawancara sebagai alat untuk peneliti dalam penelitian kualitatif. Salah satu karakteristik wawancara adalah kontak langsung antara narasumber (sumber informasi) dan *interviewer* (pengumpul data). Wawancara melibatkan tanya jawab secara lisan dan dijawab dengan secara lisan juga dengan pertanyaan terbuka antara narasumber dan *interviewer*. Wawancara merupakan suatu bentuk cara primer untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan wawancara terdapat 3 kategori yang ditetapkan peneliti sebagai narasumber, yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan untuk mendukung proses penelitian. Bagong menyatakan bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

“ 1) Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti; 3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penulisan Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 228.

Penelitian kualitatif harus memiliki pemahaman dari realitas yang ada di lapangan agar, data yang diperoleh relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengambilan informan harus sesuai dengan tujuan dan kredibilitas yang dimiliki agar sesuai dengan focus penelitian yang dilakukan. Namun pada saat di lapangan peneliti dapat mengambil informan primer atau sekunder untuk mendukung kekayaan data yang akan diperoleh. Kemudian apabila informan tersebut menyarankan kepada peneliti untuk datang ke informan yang lebih berkompeten, maka tidak menutup kemungkinan peneliti melakukan wawancara kepada informan yang disarankan. Berikut merupakan daftar informan yang telah diwawancarai oleh peneliti.

**Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara**

NO	NAMA	JABATAN
1	Alik Suharyani, S.Pd	Kepala Seksi Sekolah Dasar
2	Sri Winarti	Kepala Sekolah SDN Junrejo 01
3	Sri Wahyuni, M.KPd	Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 / Bendahara Kelompok Kerja Inklusif Kota Batu
4	Suwandi, S.Pd	Kepala Sekolah SDN Tlekung 01
5	Fridiani Yuliana	Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Junrejo 01
6	Sri Novianti	Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01
7	Herni Kurniati	Guru Pembimbing Khusus SDN Tlekung 01
	Ibu Susi	Orangtua/Wali Murid ABK SDN Junrejo 01
	Ibu Elisa	Orangtua/Wali Murid ABK SDN Mojorejo 01
	Ibu Hariati	Orangtua/Wali Murid ABK SDN Tlekung 01

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, 2017

### 3.4.2 Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan melakukan wawancara penulis juga menggunakan teknik dokumentasi. Pada dasarnya menggunakan teknik dokumentasi ini menguntungkan karena biaya yang digunakan relatif murah dan cepat. Namun kelemahan yang ada ketika menggunakan teknik ini adalah kecenderungan mendapatkan informasi yang salah jika data yang diperoleh terdapat kesalahan cetak atau penulisan.

*“Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung bersifat data primer yang didapat langsung dari pihak pertama.”<sup>7</sup>*

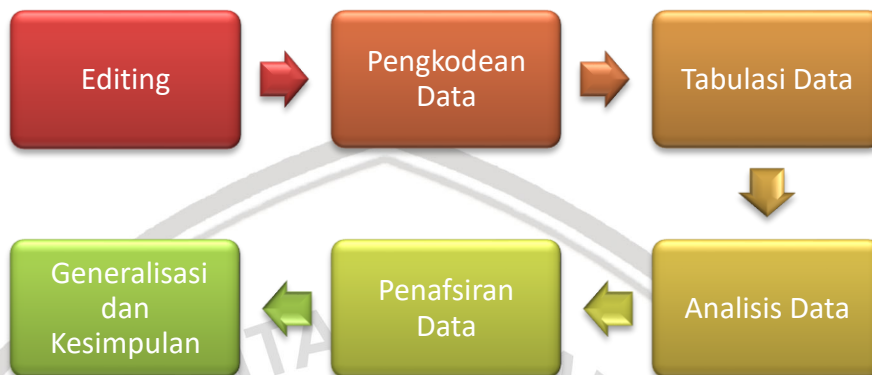
### 3.5 Teknik Analisis Data

Data mentah yang sudah didapatkan di lapangan dan akan dikumpulkan tidak akan menghasilkan jika data tersebut tidak dianalisis. Sebuah data mentah yang diperoleh/didapatkan dan dikumpulkan penulis tidak bermanfaat apabila tidak dianalisis/diolah kembali. Karena melakukan analisis data adalah hal yang penting dalam metode ilmiah sebab data analisislah yang membantu penulis dalam memecahkan suatu permasalahan. Data yang mentah perlu dibagi dalam kelompok-kelompok. Hal ini dilakukan agar data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis.

---

<sup>7</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 69

### 3.1 Bagan Proses Analisis Data



Sumber: Nazir (2013: 304-331)

Setelah data didapatkan tidak langsung diolah oleh penulis akan tetapi, data harus diedit terlebih dahulu. Hal yang harus dilakukan dalam pengeditan adalah membaca ulang data yang ada. Karena hal ini dapat memperbaiki kualitas data. Akan tetapi penulis tidak diperbolehkan untuk merubah isi data yang telah didapatkan. Apabila penulis merubah data yang asli hal ini dianggap melanggar dengan prinsip kejujuran intelektual.

Selanjutnya adalah pengkodean yang mana dilakukan untuk memudahkan dalam menganalisis. Pemberian kode yang dilakukan sangatlah penting, setelah pengkodean data alangkah baiknya data ditabulasikan dan dikategori. Reduksi data dilakukan untuk mengkategorikan data yang telah diperoleh sehingga data dapat diproses. Pengkategori data yang dilakukan akan mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengolah data yang ada.

Proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis data sangat penting karena dengan ini jawaban atas pertanyaan peneliti dapat terungkap. Untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan cara menggabungkan, diurutkan, dan mereduksi data yang telah diperoleh agar data tersebut dapat digunakan. Data yang telah diperoleh hanya menambah keterangan pada masalah yang akan dijawab. Agar dapat menarik kesimpulan, data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya.

Setelah menganalisis data, dilakukan penafsiran data untuk mencari arti yang lebih luas di dalam data yang telah diperoleh. Penafsiran dan analisis data tidak dapat dipisahkan karena kedua aspek tersebut saling berhubungan/berkaitan. Penafsiran dilakukan untuk dapat menemukan penjelasan yang lebih spesifik atau lebih dalam dari sebuah materi yang ada. Selanjutnya terakhir adalah generalisasi dan kesimpulan, dimana dari analisis lah peneliti perlu membuat generalisasi dan kesimpulan penelitiannya. Generalisasi merupakan penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis peneliti.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI**

Pada bab ini dibahas mengenai profil Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu selaku penyelenggara kebijakan pendidikan inklusif yang berada di Kota tersebut. Pada bab ini akan berisi tentang kondisi geografis Kota Batu, Profil Kota Batu sebagai pusat pemerintahan, dan profil Dinas Pendidikan Kota Batu.

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Batu**

##### **4.1.2 Sejarah Kota Batu**

Kota Batu terbentuk pada tahun 2001 yang awalnya menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Kota Batu termasuk dari wilayah Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP1) Malang Utara. Kota Batu terletak 800 meter diatas permukaan laut sehingga nampak pemandangan yang asri, udara yang bersih dan sejuk. Peningkatan penduduk Kota Batu terus bertambah setiap tahunnya dan dari data yang diperoleh pada tahun 2015 terdapat 200.485 penduduk. Kota Batu juga meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengembangan dan mengevaluasi setiap proses pembangunan secara mandiri agar terbentuk masyarakat yang semakin sejahtera. *“Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan*

*sayuran, serta panorama pegunungan dan pegunungan yang dijuluki the real tourism city of Indonesia oleh Bappenas.*"<sup>1</sup>

"Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km, maka kepadatan penduduk adalah sekitar 1.080 jiwa per km. kepadatan Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya."<sup>2</sup>

Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan Kota tujuan untuk kegiatan otonomi. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Setiap 100 penduduk perempuan di Kota Batu terdapat 102 penduduk laki-laki. Diantara ketiga Kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu mencapai 2.193 jiwa per km, hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan Hutan dan daerah lereng gunung.<sup>3</sup>

#### **4.1.2 Keadaan Geografis**

Secara astronomis Kota Batu terletak diantara 1220 17' sampai dengan 1220 57' Bujur Timur dan 70 44' sampai dengan 80 26' Lintang Selatan. Sedangkan batas administratif wilayah dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>1</sup> ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/batu. Diakses pukul 06.12 pada tanggal 15 Februari 2018

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Batu. Statistik Daerah Kota Batu Tahun 2016.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 7

- Batas wilayah utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- Batas wilayah selatan : Kabupaten Malang
- Bats wilayah barat : Kabuaten Malang
- Batas wilayah timur : Kabupaten Malang

#### 4.1.3 Profil Wilayah

Kota apel. Julukan itu telah lama melekat pada kota Batu. Apel merupakan produk khas yang menjadi andalan daerah yang atarannya berada di ketinggian 600 m diatas permukaan laut serta dikelilingi banyak gunung (Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, dan Gunung Bokong).

Kota Batu secara admistratif terbagi atas 3 kacamatan, 5 kelurahan, dan 19 desa. Selam periode 2014 – 2016 tidak perubahan wilayah di Kota Batu. Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling banyak yaitu 9 desa/kelurahan sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8 desa/kelurahan dan Kacamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan. Apabila dilihat dari jumlah RT/RW-nya , Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/RW yang paling banyak dibandingkan dua kacamata lainnya. Dapat dilihat pada table 4.1 tentang wilayah admistratif kota Batu.

**Tabel 4.1 Wilayah Admistratif Kota Batu**

Wilayah	2014	2015	2016
Kecamatan	3	3	3
Kelurahan	5	5	5
Desa	19	19	19
RW	238	238	238
RT	1.127	1.127	1.127

Sumber : *Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota Batu*

Pertumbuhan jumlah penduduk di tiga kecamatan kota Batu pada tahun 2010-2015 mengalami laju pertumbuhan penduduk sebanyak 5,42%, yang awalnya pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 190.184 jiwa bertambah menjadi 200.485 jiwa. Pada tahun 2015-2016 mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 0,91%, yang pada tahun 2015 sebanyak 200.485 jiwa menjadi 202.319 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Batu yang pada tahun 2016 memiliki penduduk sebanyak 94.132 jiwa. Kecamatan Junrejo memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit di Kota Batu yaitu sebanyak 50.079 jiwa pada tahun 2016. Selanjutnya kecamatan Bumiaji memiliki 58.108 jiwa penduduk pada tahun 2016. Dapat dilihat pada table 4.2 tentang jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kota Batu, 2010, 2015, dan 2016.

<b>Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2010, 2015, dan 2016</b>					
<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk (ribu)</b>			<b>Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)</b>	
	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2010-2015</b>	<b>2015-2016</b>
Batu	88 178	93 227	94 132	5.73	0.97
Junrejo	46 382	49 505	50 079	6.73	1.16
Bumiaji	55 624	57 753	58 108	3.83	0.61
<b>Kota Batu</b>	<b>190 184</b>	<b>200 485</b>	<b>202 319</b>	<b>5.42</b>	<b>0.91</b>

Sumber : [www.batukota.bps.go.id](http://www.batukota.bps.go.id), 2017

#### 4.2 Gambaran Umum Pendidikan Kota Batu

Adanya wajib belajar 12 tahun Kota Batu ikut menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kota Batu. Pada tahun 2018 di Kota Batu terdapat 88 sekolah negeri ataupun swasta pada jenjang SD atau MI, di jenjang SLTP atau MTs terdapat 30 sekolah negeri ataupun swasta, dan pada jenjang SLTP atau MAN dan SMK terdapat 26 sekolah.

Tahun 2015 terdapat 19.038 jumlah murid pada jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan mengalami penurunan menjadi 18.878 siswa pada tahun 2016. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanwiyah (MTs) jumlah murid pada tahun 2015 sebanyak 10.003 siswa, dan juga mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 9.968 siswa. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MAN) pada tahun 2015 memiliki jumlah murid sebanyak 9.045 siswa, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah murid menjadi 9.568 siswa.

Jumlah guru pada setiap jenjang mengalami perubahan dari tahun 2014-2016. Pada tingkatan jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) guru pada setiap tahunnya mengalami penurunan, pada tahun 2014 berjumlah 1.230 orang, pada tahun 2015 berjumlah 1.198, dan tahun 2016 berjumlah 1.084 orang. Pada tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanwiyah (MTs) jumlah guru pun mengalami penurunan setiap tahunannya, terdapat 860 guru pada tahun 2014, 762 guru pada tahun 2015 dan 708 guru pada tahun 2016. Berbeda dari Sekolah



Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanwiyah (MTs), jumlah guru di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MAN) mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Terdapat 968 guru pada tahun 2014, 1.016 guru pada tahun 2015 dan 1.054 guru pada tahun 2016.

Jumlah peserta didik juga harus diikuti dengan tenaga didik atau guru yang memadai. Rasio jumlah murid dan guru pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah 17,41 pada tahun 2016 yang berarti seorang guru mempunyai tanggung jawab untuk membimbing 17 murid. Untuk tingkatan SLTP dan SLTA masing-masing rasionya 14,07 dan 9,07. Dari angka tersebut beban guru SD lebih berat dari pada beban guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Data lengkap dapat dilihat pada table 4.3 tentang Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2014-2016.

**Tabel 4.3 Tentang Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2014-2016**

Uraian	2014	2015	2016
<b>Sekolah (SD/MI)</b>	88	88	88
<b>Murid</b>	16.752	19.038	18.878
<b>Guru</b>	1.230	1.198	1.084
<b>Rasio (Murid dan Guru)</b>	13,62%	15,89%	17,41%
<b>Sekolah (SLTA/MTs)</b>	30	30	30
<b>Murid</b>	7.192	10.003	9.968
<b>Guru</b>	860	761	708
<b>Rasio (Murid dan Guru)</b>	8,36%	13,10%	14,07%
<b>Sekolah (SLTA/MAN)</b>	26	26	26
<b>Murid</b>	7.044	9.045	9.568
<b>Guru</b>	968	1.016	1.054
<b>Rasio (Murid dan Guru)</b>	7,28%	8,90%	9,07%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batu, 2017



Salah satu ukuran dalam tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis. Prosentase penduduk yang melek huruf untuk Kota Batu tahun 2016 mencapai 96,95% atau sebanyak 3,05 % penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Batu masih buta huruf. Dari angka tersebut dapat dikatakan pendidikan di Kota Batu telah berhasil dalam menekan angka buta huruf.

Angka partisipasi Sekolah Kota Batu untuk kelompok umur 7-12 pada tahun 2015 sebesar 100 % yang berarti untuk semua anak usia sekolah dasar sudah dapat merasakan pendidikan. Selanjutnya APS untuk usia 13-15 tahun sebesar 98,11 %. Dan APS untuk usia 16-18 tahun sebesar 76,67 % . hanya APS untuk usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 yaitu mencapai 100 % dan 76,67 persen. Apabila diperhatikan semua usia sekolah, semakin tinggi usia sekolah Angka Partisipasi Sekolahnya semakin kecil.

**Tabel 4.4 Tentang Angka Partisipasi Sekolah Kota Batu**

Angka Partisipasi Sekolah	2013	2014	2015
<b>07-12 tahun</b>	99,74%	98,72%	100,00%
<b>13-15 tahun</b>	97,63%	99,02%	98,11%
<b>16-18 tahun</b>	66,95%	73,34%	76,67%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu, Katalog Badan Statistik Daerah Kota Batu 2016

### 4.3 Gambaran Umum Pendidikan Inklusif

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang meresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus maupun anak yang memiliki kesulitan menulis dan membaca. Maka dari itu, konsep pendidikan inklusif dianggap bisa mewakili konsep pendidikan luarbiasa yang diselenggarakan pemerintah selama ini.

Pendidikan inklusif di Indonesia merupakan sistem layanan pendidikan yang melibatkan Anak Berkebutuhan Khusus untuk belajar bersama dengan teman-teman sebayanya di sekolah reguler yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Seluruh pihak sekolah dituntut oleh penyelenggara pendidikan inklusif untuk melakukan penyesuaian untuk ABK dari segi sarana dan prasarana sekolah, kurikulum sekolah, dan penyesuaian sistem pembelajaran agar kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. *“Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut semua pihak sekolah melakukan penyesuaian, dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.”*<sup>4</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan inklusi melibatkan ABK untuk berpartisipasi ke dalam sekolah reguler.

---

<sup>4</sup> Mohammad Takdir Ilahi, Op.cit. Hlm 26

Pendidikan inklusif yang ada di Kota Batu merujuk pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa maka Kota Batu pun menyelenggarakan pendidikan inklusif. Adapun Pergub Jatim Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa timur berdasarkan dari peraturan tersebut Kota Batu pun membuat Perwali Kota Batu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Kota Batu telah melakukan penyelenggaraan pendidikan inklusif dari tahun pada tahun 2013 mengikuti Perwali Batu Nomor 24 Tahun 2013 :

“Setelah itu di tahun 2014, kita adakan deklarasi inklusif di Kota Batu, jadi Kota Batu adalah sebagai kota inklusi. Sehingga penyelenggrara pendidikan inklusif tadiya hanya 6 sekolah, sekarang menjadi 8 sekolah. Itupun di sekolah dasar yang paling banyak. Sekolah dasar itu ada sekitar 18 sd, dimana semua sd inti dan 6 sekolah inklusif yang awal. Kalau sekolah SD Mojorejo 01 dulu sebelum ada inklusif, belum ada .... Itu tahun 2005, untuk uji coba. Termasuk sekolah ... 01, dan lain-lain. Setelah itu baru di ... 2009, maka ini mulai dikembangkan”<sup>5</sup>

Pada tahun 2014 Kota Batu mengadakan deklarasi inklusif Batu. Adapun pada tahun 2005 Kota Batu telah mangadakan uji coba pendidikan inklusif dibeberapa sekolah. Pada tahun 2009 adanya Permendiknas NomOr 70 Tahun 2009, Kota Batu pun mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerahnyadi daerahnya

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52 WIB



## BAB V

### PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini digunakan penulis untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Menjawab pertanyaan suatu kendala yang ada dan dikaitkan dengan teori yang penulis pilih. Disini penulis memaparkan hasil dari lapangan yang tentunya sudah berkaitan dengan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dan komponen keberhasilan pendidikan inklusif.

#### 5.1 Komunikasi

Setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah harus adanya komunikasi antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan juga kepada kelompok sasaran dari kebijakan itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan pada umumnya adalah sosialisasi dari pembuat kebijakan kepada kelompok yang ditargetkan. Penyelenggara kebijakan pun melakukan komunikasi kepada pembuat kebijakan agar adanya pemahaman tentang bagaimana penyelenggarannya akan dilakukan. Adanya komunikasi yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran maupun pelaksana kebijakan atas program agar, mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program.

Penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Batu bukanlah hal yang baru dilaksanakan. Pada dasarnya pendidikan inklusif di Kota Batu telah berjalan sekitar tahun 2005/2006 yang masih dalam tahap percobaan. “... *Pada awalnya adanya pendidikan inklusi di kota Batu pada tahun 2005 sebagai bahan percobaan untuk menyelenggarakan pendidikan inkusi dan berjalannya pun pada tahun 2006 ...*”.<sup>1</sup> Seperti hasil wawancara bersama Firdiani Yuliana kordinator guru pembimbing khusus SDN Junrejo 01.

Penanggungjawab dari penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu adalah Dinas Pendidikan Kota Batu yang dibantu oleh Pokja Inklusif Kota Batu. Dinas Pendidikan dan Pokja melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi pada tahun 2014. Sosialisasi ditargetkan kepada kelompok sasaran kebijakan dan juga kepada pelaksana kebijakan itu sendiri.

Dinas pendidikan bersama pokja melakukan sosialisai kepada masyarakat dan mengundang kepala desa, agar dapat memberitahukan kepada masyarakat dengan adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah berjalan di Kota Batu. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu dibantu oleh Pokja Inklusif. Adanya sosialisasi yang dilakukan agar ABK dapat mendapatkan haknya untuk menempuh jenjang pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya, tidak harus di

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 maret pukul 09.05 WIB



sekolahkan di SLB. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Alik selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Kota Batu dari hasil wawancara penulis.

“Melalui POKJA, kalau tahun 2015/2014 kalo tidak salah, kita sudah mengundang kepala desa, untuk sosialisasikan agar anak ini tidak putus sekolah. Lewat kepala desa dan perangkatnya, agar mereka tersentuh agar anak anak mendapatkan haknya untuk belajar.”<sup>2</sup>

Dispen Kota Batu dengan sekolah dasar negeri sebagai pelaksana kebijakan juga mengadakan pertemuan rutin saat akan mengadakan ujian sekolah. Pertemuan yang dilakukan untuk membahas terkait soal yang akan diberikan kepada murid-murid ABK. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan khusus yang mengharuskan pihak sekolah memberikan soal khusus untuk ABK. Senada dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah Tlekung 01.

“... komunikasi yang dilakukan seperti apabila ulangan akan diadakan pihak dinas melakukan pertemuan untuk membahas soal yang akan diberikan. Contohnya juga barusan sekolah harus melaporkan jumlah siswa ABK. Kalau tidak ada nanti tidak terkontrol.”<sup>3</sup>

Tidak hanya itu saja, Sekolah pun berkomunikasi dengan wali murid ABK agar dapat memberitahukan tentang perkembangan anaknya disekolah. Komunikasi antara wali murid dengan pihak sekolah berupa rapat yang diadakan rutin setiap 1 bulan sekali. Pada rapat tersebut orang tua murid dengan pihak sekolah melakukan konsultasi tentang perkembangan anak dan apabila ada permasalahan individu pada murid ABK

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alik Suharyani selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.25

<sup>3</sup> Hasil wawancara penulis dengan Suwandi selaku Kepala Sekolah SDN Tlekung 01, pada tanggal 03 Februari pukul 09.30 WIB

wali murid pun dipanggil untuk membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh GPK SDN Mojorejo 01.

“Biasanya ada rapat biasanya 1 bulan sekali kita pertemuan orang tua melakukan *sharing* konsultasi individu kalau misalkan ada permasalahan juga kita biasanya kontak orang tua individu dan hadir kesekolah.”<sup>4</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu Dinas Pendidikan telah melakukan komunikasi yang berbuntut sosialisasi. Dispen dan pokja inklusi Kota Batu pun telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada wali murid yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu sosialisasi pun dilakukan kepada pihak sekolah khususnya kepala sekolah dasar yang berada di Kota Batu agar dapat meningkatkan kepedulian terhadap ABK dan dapat menerima siswa berkebutuhan khusus agar dapat menempuh jalur pendidikan pada umumnya.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan dari pihak sekolah kepada wali murid pun dapat dikatakan telah baik. Hal ini terbuktinya adanya pertemuan rutin yang dilakukan pihak sekolah dengan wali murid, membahas tentang perkembangan ABK di sekolah masing-masing. Tidak hanya itu, guru pun sering berkomunikasi kepada wali murid tentang apa yang dibutuhkan oleh siswa dan juga, menyarankan tempat terapis kepada wali muridnya.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

## 5.2 Sumber Daya

Setiap kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dan juga sarana prasarana yang memadai. Sumber daya manusia ada kecukupan baik kualitas maupun kuantitas pelaksana kebijakan yang dapat mencakup sasaran kebijakan. Sumber daya finansial merupakan kecukupan dari modal yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk sebuah program atau kebijakan. Sarana prasana merupakan penunjang dari berjalannya sebuah kebijakan. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkompeten, kebijakan yang dijalankan tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Tidak hanya itu, sumber daya finansial juga harus memadai agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Adapun sarana prasarana untuk menunjang sebuah kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, sumber daya merupakan hal yang penting agar implementasi dapat berjalan.

### 5.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan pihak sekolah selalu implementor kebijakan. Pihak sekolah adalah lembaga yang dibawahhi oleh Dispen selalu pembuat kebijakan. Semua aspek yang ada di dalam sekolah terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang di dalamnya adalah guru pendidik formal, guru pembimbing khusus, kepala sekolah dan juga seluruh staf

yang ada di dalam sekolah itu sendiri. GPK merupakan tenaga pendidik yang paling dekat dengan kelompok sasaran dari kebijakan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, GPK harus memiliki kemampuan untuk dapat mendidik ABK.

GPK pada umumnya harus dari lulus PLB (Pendidikan Luar Biasa), akan tetapi GPK pada pendidikan inklusif di Kota Batu belum terdapat lulusan dari PLB dikarenakan, sulitnya mencari tenaga kerja dari PLB. GPK pada umumnya di Kota Batu adalah lulusan psikologi atau dari PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). Kota Batu pun memberdayakan guru formal yang dapat memiliki kemampuan untuk menjadi GPK. Hal ini seperti wawancara yang penulis lakukan bersama Koordinator Guru pembimbing Khusus SDN Junrejo 01.

“Syarat khusus memang harusnya dari PLB akan tetapi sulitnya mencari tenaga kerja dari PLB. Akan tetapi kebanyakan GPK yang dari dulu ada asalnya dari psikologi. Akan tetapi yang sedang diperdayakan bukan dari PLB atau psikologi akan tetapi tenaga pendidik dari sekolah untuk menjadi GPK. Jadi sekarang dari dinas kota sebenarnya belum ada syarat khusus untuk menjadi GPK.”<sup>5</sup>

Workshop yang dilakukan untuk meningkatkan mutu GPK tidak hanya dilakukan oleh Dispen Kota Batu akan tetapi, Dispen Provinsi Jawa Timur pun melakukan workshop untuk meningkatkan mutu GPK. Pada saat Dispen Provinsi Jawa Timur mengadakan workshop tidak semua GPK diundang untuk mengikuti kegiatannya, akan tetapi GPK di tunjuk oleh Dispen Kota Batu untuk dapat menghadiri kegiatan yang ada di Surabaya. Seperti hasil wawancara penulis bersama GPK SDN Tlelung 01.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 Maret pukul 09.05 WIB

“Biasanya gantian kan guru pembimbing khususnya banyak seandainya pelatihannya yang adakan di Dinas Provinsi kita gantian ditunjuk tapi seandainya yang adakan kota Batu kita semua di undang. Kota Batu juga sering kok mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pendidikan inklusi kemarin juga difasilitasi uji kopetensi guru untuk penilaiannya dai Surabaya tapi yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan Kota Batu.”<sup>6</sup>

Dinas Pendidikan Kota Batu yang dibantu oleh Pokja mengadakan workshop guna meningkatkan mutu dari tenaga didik yang dimiliki. *“Jadi setiap tahun kami rutin mengadakannya workshop dan kami mengundang pemateri yang mempunyai kemampuan dalam pendidikan inklusif.”*<sup>7</sup> Dari pernyataan tersebut Dispen rutin mengadakan workshop agar guru dapat memiliki kemampuan dalam mengajar ABK. Dapat dilihat pada gambar 3.2 tentang kegiatan workshop pendidikan inklusif yang dilakukan Dispen Kota Batu.

**Gambar 5.1 Tentang Kegiatan Workshop Pendidikan Inklusif**



Sumber : *Dinas Pendidikan Kota Batu, 2014*

<sup>6</sup> Hasil wawancara penulis dengan Herni Kurniati selaku GPK SDN Tlelung 01, pada tanggal 31 Januari pukul 09.36 WIB

<sup>7</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alik Suharyani selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.25



Sumber daya manusia pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu dapat dikatakan masih belum cukup memadai. Hal tersebut dikarenakan GPK yang dimiliki setiap sekolah masihlah tidak seimbang dengan jumlah ABK yang dimiliki sekolah itu sendiri. Adapun 1 GPK harus membimbing 2 atau 3 murid ABK, akan tetapi pada kenyataannya dilapangan penulis menemukan 1 GPK menangani 5 sampai 6 murid ABK yang dapat dikatakan berat kebutuhannya. *“Harusnya 3 anak tergantung juga anaknya mampu didik dalam artian perilaku, konstrasinya sudah bagus itu bisa 1 guru pembimbing 4 atau 5. Akan tetapi kalau ada yang butuh perhatian khusus guru pembimbingnya individua tau maksimal 2 anak.”*<sup>8</sup> Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama GPK Mojorejo 01.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Koordinator GPK SDN Junrejo 01 mengatakan bahwa, *“Guru pembimbing khusus yang masih kurang dibandingkan jumlah siswanya, siswanyakan macam-macam bukan cuma tunagrahita ada tunawicara juga.”*<sup>9</sup> Dari pernyataan tersebut sumber daya manusia yang dimiliki Kota Batu masih kurang memadai. Macam-macam anak yang memiliki ketunaan yang berbeda membutuhkan GPK yang memiliki kemampuan untuk mendidiknya. Data guru pembimbing khusus Kota Batu dapat dilihat pada tabel 5.1 tentang data guru pembimbing khusus di Kota Batu dan Data Jumlah Siswa ABK dalam jenjang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

<sup>9</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB



sekolah dasar dapat dilihat pada tabel 5.1 tentang rekap data siswa ABK Se-Kota Batu

**Tabel 5.1 Data Guru Pembimbing Khusus Kota Batu**

No	Nama GPK	Instansi	Pendidikan Terakhir
1	Firdiani Yuliana	SDN JUNREJO 01	S1 - Psikologi
2	Eka Rini Nur Hakiki	SDN JUNREJO 01	SMU
3	Diana Fajar N.Y	SDN JUNREJO 01	S1 - Ekonomi
4	Elok Puspita Sari	SDN JUNREJO 01	S1 - Matematika
5	Lilikanti	SDN JUNREJO 02	S1 - Psikologi
6	Yunita Wuryandari	SDN JUNREJO 02	S1 - Psikologi
7	Mismiati	SDN JUNREJO 02	S1 - PGSD
8	Lillaning Retnawati S	SDN JUNREJO 02	SMU
9	Dyah Rani Ayu E.K	SDN TLEKUNG 01	S1 - Psikologi
10	Erni Kurniawati	SDN TLEKUNG 01	S1 - PGSD
11	Sri Rahayu	SDN TLEKUNG 01	D2 - PGSD
12	Rudi Prihanto	SDN TLEKUNG 01	S1- PGSD
13	Toni Adi Susilo	SDN TLEKUNG 01	S1- Sos
14	Kusmida Noer R	SDN TLEKUNG 02	S1 - Psikologi
15	Muadid Diniatin N	SDN TLEKUNG 02	S1 – B.Ingggris
16	Rr. Sri Noviani	SDN MOJOREJO 01	S1 - Psikologi
17	Mustika Alam V	SDN MOJOREJO 01	S1 - Psikologi
18	Urifah	SDN MOJOREJO 01	S. Pd
19	M.Sholeh	SDN MOJOREJO 01	S. Pd
20	M. Khalid	SDN BULUKERTO 02	S1 - Psikologi
21	Luthfiah	SD MUHAMMADIYAH 04	S1 - Psikologi
22	Linda Yani Pusfiyaningsih	SD MUHAMMADIYAH 04	S2 - Psikologi
23	Dian Kurniasih	SD MUHAMMADIYAH 04	S1 - Psikologi
24	Shofia Indahwati	SD MUHAMMADIYAH 04	S1 - Psikologi
25	Dita	SD MUHAMMADIYAH 04	S.Pd
26	Oktaviani Dewi N. H.	SDN PUNTEN 01	S1 PLB
27	Muntiani	SDN TULUNGREJO 04	S1 PGSD

28	Luber Firetnaningdyah	SDN GIRIPURNO 02	S1 Bhs. Inggris
----	-----------------------	------------------	-----------------

**Tabel 5.2 Rekap Data Siswa ABK Se-Kota Batu**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ABK
1	SDN JUNREJO 01	28
2	SDN JUNREJO 02	10
3	SDN MOJOREJO 01	14
4	SDN TLEKUNG 01	35
5	SDN TLEKUNG 02	08
6	SDN BULUKERTO 02	20
7	SD MUHAMMADIYAH 04	30
8	SDN PUNTEN 01	10
9	SDN TULUNGREJO 04	12
10	SDN GIRIPURNO 02	08
	TOTAL	175

Sumber : *Kelompok Kerja Inklusif Kota Batu, 2017*

Tidak hanya itu, Dispen Kota Batu pun dirasa masih kurang dalam mengadakan pelatihan kepada GPK yang pada dasarnya lulusan dari PGSD. Seperti yang dikatakan oleh GPK Tlekung 01 bahwa, “*Kurang pelatihan yah mas yah. Kan saya dasarnya juga masih kurang. Itu kalau menurut saya karena saya dari PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). Jadi saya butuh belajar lagi.*”<sup>10</sup> Dalam penyelenggaraan pendidikan

<sup>10</sup> Hasil wawancara penulis dengan Herni Kurniati selaku GPK SDN Tlekung 01, pada tanggal 31 Januari pukul 09.36 WIB

inklusif peran terpenting untuk mencapainya keberhasilan dalam berjalannya kebijakan ini adalah GPK itu sendiri. Apabila GPK yang dimiliki kurang memiliki kemampuan untuk mendidik ABK dikhawatirkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu berjalan dengan tidak efektif.

#### **5.2.1.1 Tenaga Pendidik**

Tenaga pendidik atau guru memiliki peran yang sangat besar terhadap siswa yang didiknya. Guru harus menggunakan metode yang tepat agar potensi anak didiknya dapat berkembang. Guru pun harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain kemampuan menguasai bahan ajar, kemampuan mengelola kelas, kemampuan menggunakan metode, media, dan sumber belajar dan kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil. Oleh karena itu, guru merupakan komponen yang paling berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi seharusnya merupakan lulusan dari PLB. Tetapi, masih sulit dan jarang nya lulusan PLB merupakan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Adapun di Kota Batu, tenaga pendidik yang dimiliki sebagian besar dari lulusan psikologi atau PGSD. Hal itu mengakibatkan dibutuhkan nya kegiatan yang meningkatkan kemampuan guru agar dapat berkompeten dalam mendidik ABK.

Dispen Kota Batu bersama Pokja inklusi rutin mengadakan kegiatan *workshop* untuk meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tidak hanya Dispen Kota, Dispen Provinsi Jawa Timur pun ikut

mengadakan kegiatan *workshop* guna meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Hal ini seperti hasil wawancara penulis bersama Ibu Novi GPK Mojorejo 01.

“Biasanya gantian kan guru pembimbing khususnya banyak seandainya pelatihannya yang adakan di Dinas Provinsi kita gantian ditunjuk tapi seandainya yang adakan kota Batu kita semua di undang ...”<sup>11</sup>

Para tenaga pendidik pun sering melakukan *sharing* ilmu tentang cara menangi ABK. Hal ini terbukti juga dengan adanya KKG (Kelompok Kerja Guru) dalam satu gugus atau sekolah yang saling berdekatan. Ada pula MGPK (Musyawarah Guru Pembimbing Khusus) yang masuk kedalam susunan organisasi Pokja. Dengan adanya KKG guru yang berada dalam satu gugus saling membantu dengan permasalahan yang dihadapinya.

“... kita di satu gugus di 5 SD punya KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk satu gugus sedangkan di Pokja kita masuk di MGPK (Musyawarah Guru Pembimbing Khusus) di bawah naungan Pokja. Jadi fungsinya ada pertemuan *sharing* ilmu. Kayak kemarin *workshop* satu hari kita mendatangkan satu sumber Pak Aksan pengawas PLB Jawa Timur kalau tidak salah membicarakan peraturan-peraturan ujian untuk sekolah terus selain itu kiita sama-sama *sharing*...”<sup>12</sup>

Namun dilain hal, tenaga pendidik yang dimiliki Kota Batu dalam penyelenggaraan pendidikan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar yang sedang berjalan masih dirasa kurang memadai. GPK pada setiap sekolah merasakan jumlah siswa yang dimiliki sekolah tidak sesuai dengan jumlah guru yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan adanya kendala yang dihadapi dalam proses belajar. Akibat dari hal

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

<sup>12</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

tersebut, pihak sekolah pun menyarankan wali murid untuk melakukan terapi seperti SDN Mojorejo 01 dan SDN Tlekung 01 lakukan. Akan tetapi, biaya untuk melakukan terapi tetap dibebankan oleh wali murid. GPK pun melakukan komunikasi kepada terapi yang telah disarankan agar saling *sharing* tentang perkembangan muridnya.

“Guru pembimbing khusus yang masih kurang dibandingkan jumlah siswanya, siswanya macam-macam bukan cuma tunagrahita ada tunawicara juga terus kita juga selama ini bekerja sama dengan tenaga ahli, dan sekarang terapi kita serakan ke orang tua sekolah hanya merekomendasikan ke tempat terapi yang sekolah anggap bagus tetapi kita tidak ada Mou sama terapinya hanya sekedar merekomendasikan karena biaya tetap dibebankan kepada orang tua. Terapinya juga kita sering berkomunikasi untuk mengetahui perkembangannya, biasanya juga terapinya datang ke sekolah untuk melihat keadaannya anak. Saya juga kadang ketempat terapinya untuk melihat perkembangannya.”<sup>13</sup>

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu masih ada kekurangan tenaga pendidik. Sedangkan, tenaga pendidik merupakan komponen yang sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Tenaga pendidik selain ABK yang berada dilingkungan sekolah pun ikut berperan aktif dalam melakukan proses belajar. Akan tetapi, GPKlah yang paling dekat kepada ABK dan terus mendampingi pada saat proses belajar di sekolah.

### 5.2.2 Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan hal sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan. Pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu Dispen mengatakan bahwa memiliki dana khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB



*Workshop* yang dilakukan diambil dari dana APBD tingkat 2 adapun Pokja memiliki dana khusus yang diberikan oleh pusat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dibawah ini.

“Kami punya anggaran khusus. Kita mengadakan *workshop* itukan sudah satu anggaran sendiri, yang kedua saat mereka kelas enam, kami mengundang guru pembimbing khusus untuk membuat soal sendiri ... Kalau *workshop* dari APBD tingkat 2 tapi kalau misalnya ada dana dari pusat, itu POKJA.”<sup>14</sup>

Adapun dana yang dimiliki Pokja merepukan bantuan dari Dinas Pendidikan Pusat. Dana yang diberikan dari pusat sebesar 100 juta akan tetapi 2 tahun terakhir dana tersebut telah dihapuskan. Dana yang diberikan untuk kegiatan deklarasi inklusif di Kota Batu. Dana tersebut juga untuk pembudayaan inklusif di Kota Batu. Setelah tidak adanya dana dari pusat Pokja pun mencoba untuk mencari donator untuk memenuhi dana yang dibutuhkan. Hal ini seperti wawancara penulis dengan Kepala Sekolah Mojorejo 01 dan bendahara Pokja.

“Dulu di POKJA itu ada dana bantuan dari pusat, tapi sudah 2 tahun ini sudah tidak. Dulu ada bantuan mungkin 100 juta, itu buat kegiatan tapi sekarang sudah tidak ada. Beberapa tahun memang ada bantuan untuk penyelenggaraan deklarasi inklusi dulu. Kemudian ada kegiatan untuk pembudayaan inklusi di Kota Batu. Tapi sekarang ini udah fakum kita tidak punya dana maka kita coba kerjasama atau mencari donatur.”<sup>15</sup>

“Jadi kemarin pada tahun 2017 itu dana dari pusat untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif itu di hapus jadi tidak bantuan untuk Pokja. Tapi sebelumnya itu ada bantuan dana dari pusat. Jadi pada tahun 2017 itu tidak ada sama sekali program yang berjalan. Pokja itu sekarang independent berdiri sendiri tanpa bantuan. Saat ada dana dari pusat pokja banyak melakukan kegiatan seperti peningkatan mutunya GPK, untuk memfasilitasi ABK juga ada, tahun kemarin kita tidak jalan karena 1. Karena dana yang tidak ada, 2 karena di masing-masing

<sup>14</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alik Suharyani selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.25

<sup>15</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52 WIB



sekolah yang menjalankan pendidikan inklusi terjadi pergantian kepala sekolahnya, jadi kendala kita itu sungguh sangat berat. ... 100 juta dalam 1 tahun perkiraan saya. Jadi sebelum ada pokja itu setiap sekolah memiliki dana operasional sekolah dan dana beasiswa itu 1 juta per anak. Untungnya untuk sekolah Junrejo sendiri memiliki dan sendiri dan di sisihkan sedikit untuk pendidikan inklusif ini.”<sup>16</sup>

Seperti yang wawancara yang dilakukan oleh penulis di atas. Dua hasil wawancara di atas bertolak belakang, Pokja tidak mendapatkan dana dari pusat baru terjadi pada tahun 2017. Dana yang diterima oleh Pokja itulah yang membiayai untuk peningkatan mutu GPK, untuk memfasilitasi ABK. Dikarenakan tidak ada dana dari pusat, program untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak ada yang berjalan. Adapun alasan lain yang mengakibatkan tidak jalannya program adalah pergantian kepala sekolah yang memiliki kebijakan berbeda-beda di dalam sekolah itu sendiri. Adanya kendala dana yang tidak dimiliki Pokja inklusif sekolah Junrejo 01 menyisihkan dana untuk pendidikan inklusif.

Dana yang diberikan pusat bukan hanya kepada Pokja inklusif, sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu juga mendapatkan dana. Dana yang diberikan oleh pusat kepada sekolah sebesar 10 juta pada tahun 2014. Dana tersebut diberikan kepada sekolah bertujuan untuk sarana dan prasarana dalam kegiatan pendidikan inkusif yang berjalan di dalam sekolah. Akan tetapi dana tersebut hanya diberikan satu kali dari pusat ke sekolah.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 Maret pukul 09.05 WIB

Dana untuk ABK pun sekarang disatukan bersama dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tidak adanya dana khusus yang diberikan kepada ABK itu sendiri untuk menunjang sarana dan prasarana. Dispen Kota Batu tidak ada memberikan dana khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi yang sedang berjalan. Dapat dilihat wawancara penulis dibawah ini.

“Dulu pertama saya menjadi kepala sekolah disini pernah dapat dana dari pusat langsung lewat kantor Pos dapat 10 juta tahun 2014. Dana lainnya tetap dengan dana BOS yang umum diberikan ke sekolah-sekolah. Anak-anak inklusif tetap dapat dana BOS seperti anak pada umumnya. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan untuk anak inklusif dinas kota membiayai kegiatannya seperti contohnya kegiatan melukis. Untuk pemberian dana operasional khusus tidak ada diberikan pihak Dinas Kota dan hanya ada sekali pemberian dana khusus pada tahun 2014 dan belum ada dana tambahan lagi.”<sup>17</sup>

Dari pernyataan-pernyataan di atas dana operasional yang dimiliki Kota Batu untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif masih dirasa kurang. Dana yang diberikan kepada sekolah untuk menunjang sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pun diberikan dari pusat kepada sekolah hanya satu kali itupun pada tahun 2014. Dana yang diberikan kepada Pokja pun sebesar 100 juta tidak lagi diberikan. Dikarena tidak adanya dana tersebut kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pun tidak dapat berjalan. Akan tetapi Pokja sendiri pun mencari dana-dana donator pada saat akan mengadakan kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara penulis dengan Suwandi selaku Kepala Sekolah SDN Tlekung 01, pada tanggal 03 Februari pukul 09.30 WIB

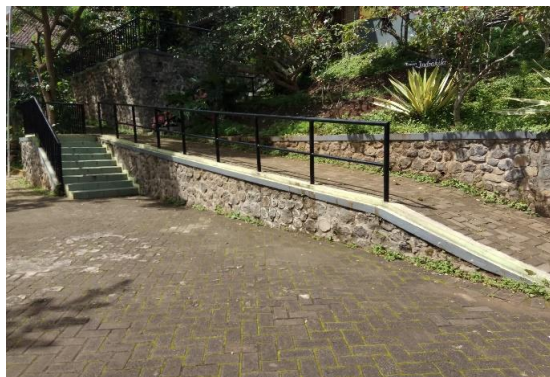
### 5.2.3 Sarana Prasarana

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan sarana dan prasarana khusus, dikarenakan media pembelajarannya memerlukan alat peraga dan juga harus adanya akses disabilitas. Pemerintah memiliki kewajiban memeberikan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu. Sekolah dasar di Kota Batu pun telah memiliki sarana dan prasarana yang dirasa sudah cukup memadai.

Dari pernyataan-pernyataan kepala sekolah dan guru pembimbing khusus yang penulis wawancarai semua mengatakan bahwa telah memadainya sarana dan prasana yang dimiliki saat ini. Saat ini sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Batu memiliki ruang kelas tersendiri untuk murid ABK dan memiliki akses disabilitas untuk murid yang tidak bisa berjalan. Sekolah pun memiliki alat peraga untuk ABK yang memiliki kesulitan belajar dan juga buku-buku yang dibutuhkan oleh ABK pada umumnya. Dapat dilihat pada gambar 3.3 sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.

**Gambar 5.2**

**Fasilitas Pendidikan Inklusif Di SDN Mojorejo 01, SDN Tlekung 01, dan SDN Junrejo 01**





Sumber : *Dokumentasi Penulis*, 2018

Dari gambar 3.3 tentang fasilitas pendidikan inklusif di SDN Mojorejo 01, SDN Tlekung 01, dan SDN Junrejo 01, dapat dilihat fasilitas-fasilitas yang dimiliki sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar di Kota Batu telah cukup memadai. Akan tetapi dari pernyataan kepala sekolah Mojorejo 01 mengatakan bahwa : “... Kemudian sarana prasarana jadi misalkan nanti kami punya anak yang membutuhkan akses disabilitasnnya sarana kami juga masih belum bisa dikatakan baik ...”.<sup>18</sup> Sarana untuk saat ini dapat dikatakan sudah memadai tetapi belum dapat dikatakan baik dikarenakan akses disabilitas yang dimiliki sekolah masih dapat dikatakan seadanya. Maka dari itu masih perlunya perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam hal sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52



### 5.3 Disposisi

*“Disposisi, yaitu munjuk Karakteristik yang menempel kepada implementor kebijakan/program.”*<sup>19</sup> Karakter/sifat yang paling penting dimiliki oleh implementor/pelaksana kebijakan yaitu komitmen, demokratis, dan kejujuran. Implementor/pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan cenderung dapat mengatasi/menyelesaikan masalah pada kebijakan yang dihadapi. Kejujuran dan komitmen akan berdampak kepada implementor/pelaksana kebijakan yang lebih bersemangat untuk menjalankan setiap proses sebuah program kebijakan. Kesan baik akan didapatkan oleh implementor/pelaksana kebijakan apabila, implementor memiliki sikap yang demokratis terhadap sasaran sebuah kebijakan. Karakteristik yang dimiliki implementor berdampak menurunkan sikap ketidakpercayaan dan menimbulkan rasa percaya dan peduli dari kelompok sasaran kepada pelaksana kebijakan.

Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kota Batu, implementor kebijakan sangat peduli dengan ABK yang menjadi kelompok sasaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pokja inklusif yang membuat program-program untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota batu. Selain itu sekolah pun memberikan kepercayaan kepada ABK agar dapat bersosialisasi dengan murid reguler lainnya. Adapun yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kepercayaan diri kepada ABK adalah

---

<sup>19</sup> Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi 2 Revisi, Gava Media, Yogyakarta, 2017, Hlm 32.

melibatkan ABK pada acara yang diadakan di Kota Batu. Dapat dilihat pada gambar 3.4 tentang ABK yang mengikuti kegiatan ulang tahun Kota Batu dibawah ini.

**Gambar 5.3 Tentang Anak Berkebutuhan Khusus yang Mengikuti Kegiatan Ulang Tahun Kota Batu**



Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Batu, 2014*

Dalam kegiatan ini pemerintah Kota Batu melibatkan ABK dalam acara ulang tahun Kota Batu yang ke-3 pada tahun 2014. ABK pada acara ini melakukan pentas tari yang di adakan di alun-alun Kota Batu. Dengan adanya acara ini Dispen Kota Batu dan Pokja inklusif memberikan dukungan terhadap ABK untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri agar dapat bersosialisasi kepada masyarakat umum.

Tidak hanya itu sekolah Mojorejo 01 memberikan *reward* kepada ABK bukan dalam bentuk materi akan tetapi dukungan moral. Hal yang dilakukan oleh sekolah adalah memeberikan kesempatan kepada ABK untuk memimpin teman-temannya dalam kegiatan senam pagi di SDN Mojorejo 01. Selain itu pihak sekolah juga mengikutkan siswa ABK untuk mengikuti acara gebyar kreatifitas siswa. Seperti pernyataan kepala sekolah SDN Mojorejo 01 di bawa ini



“Reward yang diberikan bukanlah hal materi tetapi reward yang sekolah berikan kepada anak adalah dukungan moral seperti saya jadikan dia sebagai pimpinan di depan saat senam pagi dan juga kita tampilkan pada acara gebyar kreatifitas siswa. Itulah reward yang lami berikan agar dapat menumbuhkan kepercayaan diri kepada ABK.”<sup>20</sup>

GPK sangatlah peduli dengan ABK yang didiknya. Dari observasi yang dilakukan penulis GPK sangat telaten dan sabar dalam mendidik ABK. Dalam proses belajar, ABK membutuhkan perhatian yang lebih tidak seperti siswa reguler pada umumnya. Perhatian yang lebih tersebut ditunjukkan dengan sistem pengajaran yang lebih individual ke siswanya. Hal ini ditunjukkan adanya kelas khusus untuk ABK yang memiliki kebutuhan yang lebih seperti *hyperactive* dan keterlambatan belajar. Akan tetapi adapula ABK yang mengikuti kelas-kelas reguler dengan siswa lainnya seperti tuna daksa dan tuna grahita yang masih dapat mengikuti pelajaran. Seperti gambar 3.5 Kepedulian Guru Pembimbing Khusus terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.

**Gambar 5.4 Kepedulian Guru Pembimbing Khusus Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus**

<sup>20</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52 WIB



Sumber: *Dokumentasi Penulis*, 2018

Pihak sekolah dan Dispen Kota Batu pun mendapatkan kesan yang baik dari wali murid ABK karena menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Batu. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan mutu pendidikan dan juga memberikan kesempatan kepada ABK untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler. Akibat dari adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, siswa ABK dapat bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya.

SLB yang berada di Kota Batu hanya ada 3 sekolah, hal ini mengakibatkan jauhnya akses siswa untuk dapat bersekolah di SLB terdekat. Hal ini menyebabkan anak yang berkebutuhan khusus sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu sangat disambut oleh masyarakat sekitar khususnya wali murid yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa implementor memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu.

Terbukti dengan adanya kepedulian pihak sekolah untuk mendidik ABK agar dapat percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan baik. Tidak hanya itu, Dispen Kota Batu juga terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang telah berjalan.

### 5.3.1 Input Peserta Didik

Input peserta didik juga masuk didalam kompnen keberhasilan pendidikan inklusif. Input pesrta didik ini merupakan bagaimana cara mengidentifikasi peserta didik untuk dapat mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan agar dapat memberikan kurikulum yang tepat untuk ABK. Oleh karena itu harus adanya input dari peserta didik agar dapat memberikan kurikulum yang tepat.

Adapun cara agar mengetahui tingkat kecerdasan anak didalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu adalah melakukan test psikologi. Test psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu sekolah yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk memberikan mahasiswa magang dalam melakukan test ini. Hal ini juga untuk dapat saling menguntungkan antara pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan juga mahasiswa magang agar dapt meningkatkan kemampuan yang dimiliki . GPK pun melakukan observasi terhadap anak untuk mengetahui kebutuhan ABK agar dapat memberikan metode belajar yang sesuai. Hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber yang melekuakan wawancara bersama penulis.

“Disini memang kita test psikologi agar kita dapat petakan kebutuhan anak agar dapat difasilitasi dengan baik. Jadi kami bekerja sama dengan psikolog agar dapat mengetahui kebutuhan anak yang akan belajar, psikolog yang kami pakai juga anak mahasiswa yang magang agar tidak mengeluarkan biaya tambahan.”

“Ada, biasanya itu harus domisili ... terus harus persyaratannya harus mengetes IQ terlebih terdahulu agar mengetahui anak-anak ini benar-benar ABK tidak langsung dimasukan ke kelas inklusi.”<sup>21</sup>

“Jadi ABK dilakukan observasi terlebih dahulu terus untuk penguatan kita suruh test di lembaga psikologi untuk mengetahui IQ. Tapi biasanya kita assenmen individu jadi nanti itu ketahuan. Kan kita juga sering ikut pelatihan.”<sup>22</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar murid yang dimiliki sekolah yaitu tuna grahita. Tuna grahita adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Tidak hanya itu, dari obeservari yang penulis lakukan siswa ABK yang dimiliki sekolah-sekolah yaitu tunalaras atau tidak stabilnya emosi yang dimiliki anak, tuna daksa atau mempunyai kecacatan pada fisik, dan juga autis.

### 5.3.2 Lingkungan dan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Lingkungan dan penyelenggaraan sekolah inklusif memiliki tiga aspek yaitu orang tua, pemerintah, dan sekolah. *Pertama*, orang tua disini memberikan motivasi dan memfasilitasi kegiatan anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam observasi yang penulis lakukan orang tua murid memfasilitasi anak dengan memalukan terapi setelah anak bersekolah. Adapun orang tua murid yang menunggu anaknya saat bersekolah sampai pelajaran berakhir. Hal ini memberikan motivasi kepada ABK saat disekolah.

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52 WIB

<sup>22</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

*Kedua*, pemerintah merupakan pembuat kebijakan yang ikut membantu dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas guru, memonitoring dan evaluasi program, maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah masuk dalam komponen keberhasilan pendidikan inklusi.

Seperti yang penulis telah katakana sebelumnya, peningkatan kualitas guru dan sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dispen Kota Batu dapat dikatakan telah dirasa cukup baik. Dispen Kota Batu dan Pokja telah melakukan sosialisasi ke pihak masyarakat maupun kepada sekolah itu sendiri. Untuk hal peningkatan kualitas guru pun, Dispen dan Pokja Kota Batu telah mengadakan *workshop* guna meningkatkan kualitas guru yang dimiliki. Dispen Provinsi Jawa Timur pun terkadang mengadakan *workshop* untuk GPK yang berada di wilayah Jawa Timur.

Selanjutnya, untuk hal monitoring dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu masih jarang dilakukan oleh Dispen selaku penanggung jawab kebijakan. Dispen Kota Batu melakukan kunjungan ke sekolah akan tetapi tidak khusus untuk melakukan motoring tentang pendidikan inklusif yang berjalan di sekolah. Hal ini seperti pernyataan Ibu Alik selaku seksi kurikulum Dispen Kota Batu.

“Biasanya saya datang ke sekolah, dinas pendidikan sendiri datang saat ujian dan menyanyakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, akan tetapi tidak ada monitoring khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kalau hari-hari biasa juga kadang liat, kalau anak berkebutuhan khusus biasanya saya



utamakan dulu. Biasanya saya hafal nama anaknya, “mana si rehan, gitu”. Jadi monitoringnya secara pribadi mau lihat ke sekolah mana, tidak terjadwal.”<sup>23</sup>

Tidak adanya monitoring dari pihak pemerintah dapat mengakibatkan tidak terkontrolnya sebuah kebijakan yang sedang berjalan. Akan tetapi Dispen Provinsi Jawa Timur melakukan motoring dan melakukan kunjungan untuk melihat berjalannya pendidikan inklusif di Kota Batu setiap tahunnya. Dispen Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungannya satu tahun satu kali.

“Sebenarnya yang kita inginkan itu ada. Malah yang serinya itu dari Provinsi langsung, kalau dari kota itu tidak ada. Tapi kalau cuma untuk kunjungan biasa-biasa itu satu kali satu tahun. Tapi sebenarnya kita butuh dengan monitoring dari dinas kota. Provinsi itu mengadakan monitoring setiap tahun.”<sup>24</sup>

*Ketiga*, sekolah merupakan pelaksana kebijakan pendidikan inklusif, dan sekolah harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh ABK itu sendiri. Penulis pun telah menjelaskan bahwa sekolah memberikan edukasi kepada ABK. Sekolah pun berperan aktif untuk ABK agar dapat bersosialisasi kepada siswa lainnya.

Seperti yang dilakukan oleh Kepsek Mojorejo 01, yang tidak ingin pendidikan inklusif yang berjalan seperti mengadakan SLB di dalam sekolah reguler. SDN Mojorejo 01 dan Junjrejo 01 telah membudayakan inklusif di dalam sekolah, yaitu tidak ada perbedaan antara murid satu dengan yang lainnya. Murid-murid ABK pun ada yang mengikuti pelajaran di dalam kelas reguler, tidak ditempatkan di dalam ruangan khusus.

“Saya punya program bagaimana kita membudidayakan inklusif di sekolah ini. Tadinya anak-anak inklusif disekolah ini dimasukkan ke kelas khusus, saya

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alik Suharyani selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.25

<sup>24</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 Maret pukul 09.05 WIB



tidak mau di SD Mojorejo 01 ini ada SLB di sekolah regular. Jadi anak-anak inklusif itu perlu diajak secara inklusif bersama temannya di dalam kelas. Fungsinya apa kalau kita tidak bisa memfasilitasi secara inklusi. Boleh dikelas khusus ketika anak-anak itu memiliki kebutuhan khusus. Harus adanya kesadaran ooleh segala pihak yang terlibat dalam sekolah untuk dapat memahami inklusif. Di sekolah Jenrejo 01 sudah jalan kesadaran tentang pendidikan inklusif.”<sup>25</sup> Kepsek Mojorejo 01

Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif ini merupakan, memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada ABK agar dapat menempuh pendidikan reguler pada umumnya. Adanya pendidikan inklusif ini juga memberikan peluang ABK agar dapat berkembang dan bersosialisasi di sekolah dengan murid sebayanya. Adapun, kedepannya untuk dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi kepada masyarakat pada umumnya. Maka dari itu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memberikan lingkungan yang baik dan juga memberdayakan inklusif di sekolahnya.

#### 5.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek birokrasi birokrasi mencakup dua hal penting pertam adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline sebuah kebijakan. sedangkan struktur organisasi pun sejauh mungkin menjahui hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52

pelaksana harus dapat mengambil keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secepatnya.

#### 5.4.1 *Standart Operating Procedur*

Temuan penulis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu adanya ketidak jelasan tetang mekanisme dalam kebijakan ini. Dalam wawancara yang dilakukan penulis bersama kepala sekolah Tlekung 01, mengatakan bahwa mekanismes tenang pelenggaraan pendidikan inklusif hanya lewat pemberitahuan saja. Tidak adanya SOP yang tertulis, akan tetapi pihak sekolah mengetahui teknis seperti penerimaan murid baru kepada ABK. Dalam penerimaan murid baru, ABK harus melewati prosedur seperti tes IQ yang dibantu dari Universita Muhammadiyah Malang untuk mengetahui kebutuhan anak yang ingin bersekolah agar mendapatkan metode pembelajaran yang seusiai. Hal ini serpti pernyataan dari kepala sekolah SDN Tlekung 01.

“Ada, untuk prosedurnya hanya pemberitahuan saja, tapi ada edarannya. Pokoknya harus mau menerima. Untuk secara tertulis memang tidak ada tapi secara teknis, setiap ada penerimaan murid baru. Melewati prosedur tes IQ yang dibantu Universitas Muhammadiyah Malang untuk dapat mengetahui kebtuhan anak yang ingin bersekolah agar dapat mendapatkan pembelajaran yang sesuai. Kalau prosedur yang diberikan dari Dinas Kota tidak ada. Secara teknis kita sendiri.”<sup>26</sup>

Begitu pula pernyataan dari kepala sekolah SDN Mojorejo 01 yang mengatakan bahwa, “*Sementar dari dinas sendiri tidak memberikan SOP yang tertulis kepada sekolah. Akan tetapi kami di sekolah mengembangkan sendiri karena inklusi itu juga*

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara penulis dengan Suwandi selaku Kepala Sekolah SDN Tlekung 01, pada tanggal 03 Februari pukul 09.30 WIB

*merupakan hal yang baru ...*<sup>27</sup>. Dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa Dispen Kota Batu tidak ada memberikan SOP tertulis kepada sekolah. Alasan yang diberikan kepala sekolah SDN Mojorejo 01 adalah dikarenakan pendidikan inklusif merupakan hal yang baru. Hal ini menyebabkan adanya ketidak jelasan bagaimana kebijakan ini berjalan sampai sekarang.

Sejalan dengan pernyataan-pernyataan kepala sekolah SDN Tlekung 01 dan SDN Mojorejo 01 dari pihak Dispen pun mngatakan tidak adanya SOP dari penyelenggaraan pendidikan inklusif Kota Batu. Saat penulis menanyakan SOP dalam kebijakan ini Ibu Alik selaku seksi kurikulum Dispen Kota batu mengatakan bahwa, *“Kalau dari undang-undangnya tidak ada, tapi kalau dari perwali itu ada. Kalau dari dinasnya juga tidak ada, saya tidak bikin”*<sup>28</sup>. Dari pernyataan tersebut adanya ketidakjelasan SOP yang dimiliki dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pada Perwali Kota Batu Nomor 23 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif telah dijelaskannya tentang mekanisme penerimaan peserta didik, kewajiban pemerintah daerah, pembelajaran dan penilaian, dan kompetensi dan kewajiban guru. Adanya peraturan ini memperjelas tentang kewajiban pemerintah, guru dan cara penerimaan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi SOP yang

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 february pukul 09.52 WIB

<sup>28</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alik Suharyani selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.25

dituliskan oleh Dispen telah diatur di dalam Perwali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

#### 5.4.1.1 Fleksibilitas Kurikulum

Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasaan Dan/Atau Bakat Istimewa pada pasal 7 dan pasal 8. Pada pasal 7 menjelaskan bahwa, *“Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan minatnya.”*<sup>29</sup> Sedangkan pada pasal 8 mengatakan bahwa, *“Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.”*<sup>30</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu pun menggunakan kurikulum reguler yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ABK. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasaan Dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 7

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasaan Dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 8

Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa yang juga mengatur tentang adanya perubahan yang dilakukan dalam kurikulum yang diberikan kepada ABK. Seperti yang dikatakan oleh GPK SDN Mojorejo 01.

“Kurikulum sama seperti yang dipake cuman dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dari anaknya. Yang memodifikasi indikatornya dan tujuan belajar sama kegiatan belajarnya contohnya kayak ini Adil, Adil inikan belum mengenal angka, jadi seandainya anak yang lain tentang perkalian dia bisa penjumlahan jadi dia penjumlahan dulu.”<sup>31</sup>

Sejalan dengan pernyataan GPK SDN Mojorejo 01, koordinator GPK SDN Junrejo 01 juga mengatakan bahwa kurikulum dapat diubah. Akan tetapi, dalam peraturan yang tertulis mengayatakan tidak boleh merubah kurikulum yang ada. Kenyataannya dilapangan para ahli-ahlinya membolehkan merubah kurikulum yang ada. Jadi adanya perubahan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dari ABK untuk dapat menyesuaikan tingkat kecerdasannya.

“Kalau kurikulumnya sama, kebetulan disini masih ada kelas 1 sama kelas 2 .... pengertian kita untuk kurikulum itu .... kalau yang tertulis itu tidak boleh merubah kurukulum, tapi dilapangan itu para ahli-ahlinya membolehkan merubah kurikulum. Jadi kita disini berjalan ya kalau dibutuhkan merubah, ya diubah dikit. Metode pembelajarannya sama mungkin di ringankan sama teman-temannya yang lain.”<sup>32</sup>

Pada Perwali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif juga menjelaskan tentang harus adanya fleksibilitas kurikulum yang dimiliki. Pada bab 6 tentang pembelajaran dan penilaian, dijelaskan pada pasal 8

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

<sup>32</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 Maret pukul 09.05 WIB



bahwa “Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik.”<sup>33</sup>

Dilanjutkan pula pada pasal 9 pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.”<sup>34</sup> Diikuti pasal 9 ayat 3 “Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.”<sup>35</sup>

Tidak hanya itu GPK pun memiliki Program Pembelajaran Individu (PPI) kepada ABK. PPI ini merupakan program yang berdasarkan kebutuhan ABK untuk melakukan tahap-tahap dalam pembelajaran kedepannya. Didalam PPI ini terdapat uraian kegiatan seperti tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik/alat penilaian. Dalam PPI ini juga GPK sudah melakukan observasi kepada ABK agar dapat memberikan metode pembelajaran yang sesuai. Dapat dilihat pada gambar 3.6 tentang contoh Program Pembelajaran Individu yang dimiliki GPK SDN Mojorejo 01

**Gambar 5.5 Tentang Contoh Program Pembelajaran Individu**

33 Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 8

34 Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 9 ayat 2

35 Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pasal 9 ayat 3

Sumber : *Dokumentasi Penulis*, 2018

Adanya perubahan kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu ini, membuktikan adanya fleksibilitas bahan ajar yang digunakan untuk ABK. PPI yang dimiliki GPK juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk dapat membantu tahap-tahap perkembangan ABK. Hal ini juga dikarenakan ABK merupakan anak yang membutuhkan kekhususan dalam metode pembelajaran yang digunakan. Akan tetapi, apabila ABK tidak mempunyai masalah dalam hal akademik maka akan tetap menggunakan kurikulum pada umumnya.

#### **5.4.1.2 Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang penting dalam sistem pendidikan yang dimiliki di Indonesia. Evaluasi pembelajaran dilakukan guna mengetahui tingkat kecerdasan pada murid yang sedang menempuh pendidikan. Evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan dalam bentuk ujian harian, ujian semester, dan ujian nasional.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pun evaluasi pembelajaran juga merupakan hal yang penting dalam melihat perkembangan anak. Akan tetapi dalam evaluasi pembelajaran yang dilakukan sangatlah berbeda dengan murid reguler pada

umumnya. Pada umumnya evaluasi pembelajaran ditentukan dari hasil nilai akademik yang dilakukan murid. Pada evaluasi pembelajaran murid ABK bukan nilai akademik menjadi faktor utama dalam penentuan nilai yang dilakukan akan tetapi, perilaku siswa juga menjadi faktor yang dinilai. Seperti halnya dua pernyataan dibawah hasil wawancara yang penulis lakukan.

“Biasanya kita mengevaluasinya dengan cara melihat langsung kemampuannya kembali lagi yang dinilai itu bukan lisan ada hasilnya tapi dari segi perbuatannya kita nilai, perubahan perilaku, komunikasi. ABK biasanya kurang bisa berkomunikasi dengan baik.”<sup>36</sup>

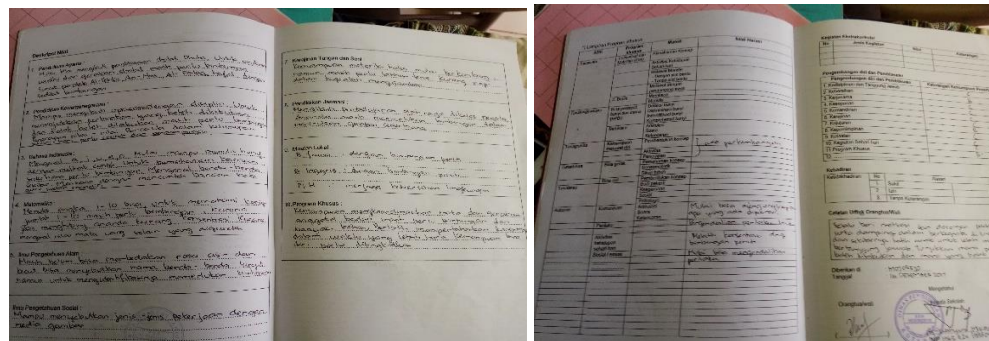
“Iya memang beda karena Namanya khusus semuanya khusus. Jadi kelebihan anak ABK kita tonjolkan dan kekurangannya kita minimalkan sehingga anak-anak merasa kita hargai. Contohnya si anggun sudah mampu untuk merwat diri sendiri perlu bimbingan dalam hal apa ... nanti rapotnya akan seperti itu.”<sup>37</sup>

Kekhususan dalam cara penilaian kepada ABK memang sangat diperlukan. Dikarekan cara penilaian yang berbeda dengan murid yang lain, ABK pun memiliki buku rapot yang berbeda. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan dari hasil wawancara, perilaku pun ikut dinilai dan rapot yang digunakan untuk ABK bukanlah hanya menilai akademiknya saja. Dapat dilihat pada gambar 3.7 tentang buku rapot ABK pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu.

### **Gambar 5.6 Tentang Buku Rapot ABK**

<sup>36</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

<sup>37</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 februari pukul 09.52 WIB



Sumber : *Dokumentasi Penulis*, 2018

Didalam buku rapotnya tersebut terdapat tabel-tabel yang berisi tentang ketunaan yang dimiliki anak, program khusus kepada anak contohnya seperti komunikasi atau kemampuan merawat diri, materi yang diberikan, dan nilai narasi. Nilai yang diberikan pada setiap pelajaran bukanlah bentuk angka-angka pada murid pada umumnya akan tetapi, nilai yang diberikan dalam bentuk deskripsi tentang perkembangan dalam pelajaran yang dilakukan.

ABK pada saat melakukan ujian sekolah atau pun ujian nasional akan didampingi oleh GPK apabila memiliki kesulitan dalam hal akademik. Soal ujian yang diberikan pun telah dimodifikasi untuk kebutuhan anak itu sendiri. Jadi pada saat ujian nasional akan diadakan Pokja bersama Dispen Kota Batu membuat soal khusus untuk ABK agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila ABK memiliki gangguan terhadap kemampuan akademiknya, tetap akan melakukan ujian dengan soal pada umumnya. Seperti dua pernyataan wawancara yang penulis lakukan.

“... Jadi kalau kita ujian anak-anak ABK kan nda juga diikuti ujian nasional ABK karena kemampuannya dibawah rata-rata dan terbatas, itu kita difasilitasi membuat soal khusus untuk ABK. Dan dinas langsung yang membantu. Jadi dari undang-undang yang kita di share ABK mempunyai 2 kemungkinan ujian, ABK tanpa gangguan dalam artian dia tunadaksa atau autis tapi dia memiliki



kemampuan yg sama tetap akan diikuti ujian nasional yang sama, tapi ketika ABK yang memiliki keterbatasan akademik itu difasilitasi untuk ujian khusus. Jadi kemarin tiap tahun kita diberikan kisi-kisi terus kisi-kisinya ini kita sesuaikan dengan kemampuannya.”<sup>38</sup>

“Untuk ujiannya anak *slow learner* dibacakan soalnya. Kalau ujian anak-anak itu didampingi, kalau yang berat selama dia tidak bermasalah sama akademik tidak dibantu, kemungkinan ujiannya sendiri. Jadi ABK ada yang didampingi ada juga yang mengikuti ujian umum.”<sup>39</sup>

Evaluasi pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu dapat dikatakan telah baik. Dalam evaluasi pembelajaran yang dilakukan tidaklah berpatokan dengan nilai angka-angka pada umumnya akan tetapi, lebih kedeskripsi apa perkembangan yang telah dilakukan ABK pada setiap pelajaran yang dilakukannya. Pada saat ujian Dispen Kota Batu, Pokja inklusi dan GPK membuat soal ujian khusus untuk dapat menyesuaikan ABK yang memiliki tingkat kemampuan akademik dibawah rata-rata. Tidak hanya itu, GPK turut mendampingi ABK yang memiliki kesulitan dalam akademik untuk membacakan soal pada saat ujian berlangsung. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran pada pendidikan inklusif yang berjalan di Kota Batu telah dapat dikatakan baik

#### 5.4.2 Struktur Organisasi

Ada tiga pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu. Pertama, pihak Dispen Kota Batu selaku pembuat kebijakan. Kedua, Pokja inklusi selaku pelaksana kebijakan dan juga

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sri Novianti selaku Guru Pembimbing Khusus SDN Mojorejo 01, pada tanggal 06 Februari pukul 09.22 WIB

<sup>39</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 Maret pukul 09.05 WIB



perantara antara pihak sekolah dan juga pihak Dispen Kota Batu. Ketiga, pihak sekolah sebagai pelaksana kebijakan.

Dinas Pendidikan Kota Batu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan badan yang memberikan tugas kepada sekolah untuk mengadakan pendidikan inklusif. Dispen Kota Batu merencanakan dan membuat Surat Keputusan (SK) untuk sekolah agar menyelenggarakan kebijakan yang ada. Dispen juga mengadakan *workshop* kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik, tugas lainnya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah agar paham dengan kebijakan yang dilakukan. Dispen pun menyiapkan saran dan prasarana untuk kesiapan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

“Wewenang Dinas Pendidikan seperti menunjuk sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dinas Pendidikan memberikan SK (Surat Keputusan), karena kalau dinas menunjuk sekolah menjadi sekolah inklusi, dinas harus menyiapkan sarana dan prasarananya. Tidak ada tumpang tindih antara dinas dan sekolah. Jadi sekolah apabila ingin membuat kebijakan disekolah mereka pasti berkomunikasi kepada dinas.”<sup>40</sup>

### **Bagan 5.1**

#### **Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batu**

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara penulis dengan Alik Suharyani selaku Kepala Seksi Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pada tanggal 29 November 2017 pukul 13.25



38

“Kan di Batu ini sudah menjadi kota inklusif dan sebelum menjadi kota inklusif ini harus ada Pokja dulu. Jadi Pokja itu semacam turunan dari dinas, selain dari dinas ada Pokja inklusifnya sendiri. Semisalnya kita inikan ada MGPK (Musyawarah Guru Pembimbing Khusus) jadi kalau kita mempunyai program kita usulkan dulu ke Pokja dan misalkan didukung oleh Pokja terus kita ke dinas. Jadi sebelum kita mengajukan program ke dinas kita matangkan dulu di dinas dan semua GPK termasuk anggota dari Pokja.”<sup>41</sup>

Pokja pun memiliki fungsi memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan inklusif di Kota Batu. *Workshop* pun dapat dilakukan oleh Pokja dan juga dapat diselenggarakan oleh Dispen. Pokja di Kota Batu pada saat ini diketuai dari Dispen akan tetapi tidak menutup kemungkinan dari pihak lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat menjadi ketua dari Pokja. Adapun keanggotaan dari Pokja dari pada saat ini dari kepala sekolah, dan juga guru-guru yang ada di Kota Batu. Pokja pun dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan kegiatan. Seperti yang telah dilakukan pada saat Pokja bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang dalam kegiatan mengasesmen ABK.

“Kelompok Kerja itu fungsinya memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan inklusif yang ada di Kota Batu. Kita bisa melakukan MOU dengan perguruan tinggi, dan bisa melakukan MOU dengan dinas terbaru. Jadi pengurus POKJA itu tidak harus dari dinas pendidikan saja, tapi bisa dari BAPPEDA, dari semua komponen yang ada di Kota Batu. POKJA itu harusnya tidak dari dinas, tapi memang ketuanya kebetulan diambil dari dinas, bendaharanya saya sendiri, sekertarisnya dari kepala sekolah Puntan 01. *Workshop* juga bisa diselenggarakan oleh POKJA, bisa juga dari dinas. Jadi kemarin hari disabilitas, kita fasilitasi POKJA, ketika kita punya uang. Tetapi ketika kita

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara penulis dengan Firdiani Yuliana selaku Koordinator Guru Pembimbing Khusus SDN Jenrejo 01, pada tanggal 13 Maret pukul 09.05 WIB

tidak punya uang, maka kemaren bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengadakan asesmen kepada anak-anak ...”<sup>42</sup>

Pihak sekolah memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu adalah memberikan edukasi kepada ABK. Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar ini merupakan pihak yang paling dekat dekat dengan kelompok sasaran yaitu ABK. Sekolah pun memiliki peran yang sangat besar untuk dapat mendidik ABK agar dapat bersosialisai dengan baik, juga agar memiliki kemampuan akademik, dan bakat dan potensi pada anak.

“Peran sekolah memfasilitasi edukasi, membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada pengecualian bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan hal itu masih banyak belum dipahami oleh semua pihak. Keberhasilan itu dinilai dari bagaimana proses itu, bagaimana keterampilan sosialnya. Tapi alhamdulillah disini saya memfasilitasi anak-anak karena kurangnya anak-anak. Itu bagaimana kreatifitas kita sebagai kepala sekolah, mengetahui kemampuan anak-anak tersebut. jadi kita memfasilitasi apa yang anak butuhkan disekolah ini.”<sup>43</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu pada jenjang sekolah dasar memiliki sturktur organisasi yang tidak berbelit. Struktur organisasi yang dimiliki saling membantu dalam penyelenggaraan kebijakan. Dispen dan Pokja inklusi Kota Batu saling membantu dalam penyelenggaraan program yang dijalankan, dengan adanya Pokja sangat membantu kinerja Dispen Kota Batu. Pokja pun dibentuk untuk khusus menangani dengan permasalahan dalam kebijakan ini. Dengan adanya pokja inklusif penyelenggaraan pendidikan inklusif pun menjadi lebih efisien

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 february pukul 09.52 WIB

<sup>43</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SDN Mojorejo 01 dan Bendahara Pokja (Kelompok Kerja) Inklusi Kota Batu, pada tanggal 5 february pukul 09.52 WIB

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang temuan-temuan di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Selain kesimpulan yang didapatkan penulis juga memberikan rekomendasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu.

#### **1.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu yaitu : a) Dinas Pendidikan Kota Batu bersama Pokja inklusi telah melakukan sosialisai kepada sekolah dan juga masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. b) Dspen juga rutin mengadakan pertemuan bersama sekolah pada saat sebelum ujian dilaksanakan untuk membuat soal khusus untuk ABK. c) Sekolah pun rutin mengadakan pertemuan bersama wali murid setidaknya satu bulan sekali untuk dapat saling berbagi tentang perkembangan siswa ABK. d) GPK pun memiliki KKG dan MGPK agar dapat saling berkomunikasi untuk berbagi ilmu tentang metode pembelajaran yang dilakukan terhadap ABK



2. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi ini sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat kurang, tidak seimbangnya jumlah GPK dengan murid ABK yang dimiliki setiap sekolah di Kota Batu. Dalam hal sumber daya finansial pun masih kurang memadai, adanya bantuan yang dimiliki Pokja sebesar 100 juta rupiah untuk dapat menjalankan program-program yang ada telah dihapuskan. Dana yang ada hanyalah BOS untuk murid-murid pada umumnya.
3. Dalam hal disposisi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu, para pelaksana kebijakan sangat peduli dengan ABK. Dispen dan Pokja inklusi selalu meningkatkan mutu dari pelayanan pendidikan khususnya pendidikan inklusif. GPK pun sangat tekun dan sabar dalam mendidik ABK.
4. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Batu prosedur dalam penyelenggaraan telah diatur dalam Perwali Kota Batu Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Selanjutnya tidak berbelitnya struktur organisasi yang dimiliki membuat fleksibelnya organisasi dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Adapun kurikulum yang digunakan pun telah fleksibel, guna menyesuaikan tingkat kemampuan ABK. tidak hanya itu evaluasi pembelajarannya pun telah menyesuaikan dengan kemampuan anak yang dimiliki. Dalam struktur organisasi tidak adanya tumpang tindih antara Dispen, Pokja, maupun sekolah

## 1.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan diatas di atas. Penulis menawarkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian masalah yaitu :

1. Harus adanya pendanaan khusus untuk penyelenggaran pndidikan inklusif ini agar dapat menjalankan program-program dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif.
2. Mutu tenaga pendidik pun harus lebih ditingkatkan dan lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru.
3. Untuk dinas pendidikan, harusnya melakukan monitoring dalam penyelenggaran kebijakan ini,
4. SOP dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pun harus dibuat agar, para pelaksana kebijakan dapat mengikuti prosedur-prosedr yang ada.
5. Fasilitas yang dimiliki pun harus diperbaharui dikarenakan, ada kases jalan disabilitas yang telah rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dari Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publi.*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penulisan Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi 2 Revisi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Joker, Jan, dkk. 2011. *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muchlis Hamid. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisi, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Profil Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penulisan Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.
- Takdir Ilahi, Mohammad. 2016. *Pendidikan Inklusif : Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penulisan Sosial edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publisng Service).

### **Hasil Wawancara**

- Wawancara bersama Ibu Alik Suharti selaku seksi kurikulum sekolah dasar Dinas Pendidikan Kota Batu
- Wawancara bersama Ibu Sri Winarti selaku kepala sekolah SDN Junrejo 01
- Wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni selaku kepala sekolah SDN Mojorejo 01
- Wawancara bersama Pak Suwandi selaku kepala sekolah SDN Tlekung 01
- Wawancara bersama Ibu Fridiani Yuliana selaku koordinator GPK SDN Junrejo 01
- Wawancara bersama Ibu Sri Novianti selaku GPK SDN Mojorejo 01
- Wawancara bersama Ibu Herni Kurniati selaku GPK SDN Tlekung 01
- Wawancara bersama Ibu Susi selaku orang tua murid ABK SDN Junrejo 01
- Wawancara bersama Ibu Elisa selaku orang tua murid ABK SDN Mojorejo 01
- Wawancara bersama Ibu Hariati selaku orang tua murid ABK SDN Tlekung 01

### **Undang-undang**

- Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 70 Tahun 2009.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 17 tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Walikota Batu Nomer 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

**Berita Online**

[http://www.antarane.ws.com/berita/527190/kemdikbud-angka-pertisipasi-bersekolah-anak-](http://www.antarane.ws.com/berita/527190/kemdikbud-angka-pertisipasi-bersekolah-anak-berkebutuhan-khusus-rendah)

[berkebutuhan-khusus-rendah](#) dilihat tanggal 9 September 2017, Pada Pukul 10.58 WIB.

